



# LAPORAN KINERJA



20  
24

## Pusat Teknologi Informasi

Sekretariat Jenderal  
**Dewan Perwakilan Rakyat**  
Republik Indonesia



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI (PUSTEKINFO)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Tingkat Eselon II di Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kepala Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 17 Januari 2025  
Inspektur II,

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA., QHIA., QIA  
NIP.196811251993022001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi Tahun 2024 tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas atas Perjanjian Kinerja yang telah disepakati oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi. Pada tahun 2024, terdapat 2 sasaran dan 6 indikator kinerja utama yang mencerminkan dukungan Pusat Teknologi Informasi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Dibandingkan tahun 2023, terdapat penambahan satu indikator, yaitu Nilai IKPA pada masing-masing unit kerja yang meliputi beberapa aspek, seperti Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, dan Capaian Output.

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Road Map RB Tahun 2020-2024, evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tidak lagi dilakukan di lingkup Eselon I, melainkan hanya di tingkat instansi. Hal ini berdampak pada penghapusan beberapa indikator yang sebelumnya ada.

Selain itu, kami juga menyesuaikan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi terakhir untuk memastikan peningkatan target kinerja di masa mendatang.



Keberhasilan penyusunan laporan ini adalah hasil kerja sama seluruh tim yang terlibat dalam prosesnya. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah diberikan. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menggambarkan peran Pusat Teknologi Informasi dalam mendukung peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
PLT. KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI

Ir. Sumaryandono, MPM.



@pustekinfo.dprri



@PustekinfoDPRRI

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>4</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>7</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>9</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>13</b>
1.1.    Gambaran Umum.....	13
1.2.    Dasar Hukum.....	14
1.3.    Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi .....	15
1.3.1.    Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi.....	16
1.3.2.    Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi .....	17
1.3.3.    Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi .....	17
1.3.4.    Komposisi Pegawai Pusat Teknologi Informasi.....	18
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>22</b>
2.1.    Rencana Strategis.....	22
2.2.    Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>26</b>
3.1.    Sasaran Program Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik .....	31
3.1.1.    Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja .....	31
3.1.2.    Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	32
3.1.3.    Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Pada Renstra.....	34
3.1.4.    Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	35
3.1.5.    Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	36
3.1.6.    Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya .....	37
3.1.7.    Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	39
3.2.    Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Persentase Dukungan Teknologi Informasi) .....	51
3.2.1.    Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja .....	51
3.2.2.    Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	52
3.2.3.    Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Pada Renstra.....	54
3.2.4.    Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	55
3.2.5.    Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	55

3.2.6.	Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya .....	58
3.2.7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	61
3.3.	Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Percentase Aplikasi yang Terintegrasi) .....	65
3.3.1.	Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja.....	65
3.3.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	66
3.3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Pada Renstra.....	68
3.3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	68
3.3.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.	69
3.3.6.	Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya .....	71
3.3.7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	72
3.4.	Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Indeks Kepuasan Anggota DPR RI) .....	80
3.4.1.	Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja .....	80
3.4.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	81
3.4.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Pada Renstra.....	81
3.4.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	82
3.4.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.	82
3.4.6.	Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya .....	84
3.4.7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	84
3.5.	Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Nilai IKPA Pusat Teknologi Informasi) .....	85
3.6.	Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Percentase Realisasi Anggaran) .....	88
3.6.1.	Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja.....	88
3.6.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	89
3.6.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Pada Renstra.....	89
3.6.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	90
3.6.5.	Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.	90
3.6.6.	Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....	91

3.6.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	92
3.7. Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi.....	96
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
4.1. Kesimpulan.....	99
4.2. Rekomendasi.....	101
<b>LAMPIRAN 1 .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN 2 .....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai Pusat Teknologi Informasi .....	18
Tabel 2 Target Sasaran Program 3 pada Perubahan Renstra Setjen DPR 2021-2024 .....	23
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2022-2024.....	24
Tabel 4 Skala Nilai Peringkat Kinerja dan Kategori .....	26
Tabel 5 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Teknologi Informasi Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	26
Tabel 6 Kegiatan Utama dan Indikator dari Sasaran Program Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	28
Tabel 7 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja pada Program Pengelolaan Teknologi Informasi berdasarkan Renstra Setjen DPR RI 2021-2024 .....	29
Tabel 8 Perbandingan Target Akhir 2024 dengan Capaian 2024 .....	30
Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	32
Tabel 10 Perbandingan Capaian Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari Tahun ke Tahun .....	32
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra.....	34
Tabel 12 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional SPBE.....	35
Tabel 13 Hasil Penilaian SPBE Tahun 2024 Kategori Sekretariat Jenderal Lembaga Negara .....	35
Tabel 14 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	36
Tabel 15 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	37
Tabel 16 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain DPR RI .....	47
Tabel 17 Daftar SK dan Instruksi yang Telah Disusun Tahun 2024.....	50
Tabel 18 Daftar SOP yang Telah Disusun Tahun 2024.....	51
Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	51
Tabel 20 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Dukungan Teknologi Informasi yang Dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Tahun ke Tahun .....	52
Tabel 21 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra.....	54
Tabel 22 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	55
Tabel 23 Capaian Rencana Aksi Indikator Kinerja Persentase Dukungan Teknologi Informasi yang Dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia .....	57
Tabel 24 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	58
Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	65
Tabel 26 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Aplikasi yang Terintegrasi dari Tahun ke Tahun.....	66
Tabel 27 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra.....	68
Tabel 28 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	69
Tabel 29 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	71
Tabel 30 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Selama Tahun 2024 .....	73
Tabel 31 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	80
Tabel 32 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi dari Tahun ke Tahun .....	81
Tabel 33 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra.....	81
Tabel 34 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	82
Tabel 35 Hasil Survey IKM Layanan Pusat Teknologi Informasi Tahun 2024.....	85
Tabel 36 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	85
Tabel 37 Rekap IKPA Pusat Teknologi Informasi Tahun 2024 .....	86

Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	88
Tabel 39 Perbandingan Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi Tahun 2022, 2023 dan 2024.....	88
Tabel 40 Perbandingan Capaian Indikator Persentase realisasi anggaran dari Tahun ke Tahun .....	89
Tabel 41 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra.....	90
Tabel 42 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	90
Tabel 43 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	91
Tabel 44 Realisasi Anggaran Pustekinfo.....	96

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Teknologi Informasi Setjen DPR RI .....	15
Gambar 2 Histori Penilaian SPBE DPR RI .....	32
Gambar 3 Hasil Audit Surveillance ISO/IEC 27001:2022 .....	41
Gambar 4 Audit Internal TIK dengan Inspektorat, didampingi oleh BRIN .....	41
Gambar 5 Forum Satu Data DPR RI: Penguatan Tata Kelola dan Integrasi Data untuk Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas.....	42
Gambar 6 Kegiatan Penyusunan RITIK 2025-2027 .....	43
Gambar 7 Kickoff Meeting Penyusunan RITIK Sekretariat Jenderal DPR RI yang Dihadiri Sekretaris Jenderal DPR RI .....	44
Gambar 8 Kegiatan Perencanaan MLTI dan Persiapan Audit ISO/IEC 20000-1:2018.....	45
Gambar 9 Draft Perubahan SK 1047/2023 tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko TI.	46
Gambar 10 Surat Persetujuan Kebutuhan JF Statistisi dari Kementerian PANRB.....	48
Gambar 11 Penggunaan Ruang Penyimpanan Data Parlemen Pusat Data TelkomSigma .	62
Gambar 12 Pemeliharaan Rutin Jaringan .....	64

## EXECUTIVE SUMMARY

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga negara yang memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pusat Teknologi Informasi merupakan salah satu unsur pendukung di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang bertugas melaksanakan tata kelola teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi.

Terdapat 2 sasaran program dan 6 indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Eselon II Kepala Pusat Teknologi Informasi di tahun 2024, yakni:

1. Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik
  - 1.1 Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi
  - 2.1 Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  - 2.2 Persentase aplikasi yang terintegrasi
  - 2.3 Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Teknologi dan Informasi
  - 2.4 Nilai IKPA Pusat Teknologi Informasi
    - Revisi DIPA
    - Deviasi Halaman III DIPA
    - Penyerapan Anggaran
    - Belanja Kontraktual
    - Penyelesaian Tagihan
    - Capaian Output
  - 2.5 Persentase realisasi anggaran

Pada sasaran program yang terkait dengan penerapan indikator kinerja Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dicapai melalui hasil indeks

penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024 yakni sebesar 4,23 (predikat Memuaskan).

Pada sasaran program untuk meningkatkan kualitas dukungan data dan informasi dengan indikator dukungan teknologi informasi yang telah disiapkan oleh Pusat Teknologi Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yakni dalam bentuk ketersediaan aplikasi dan sistem informasi yang dimanfaatkan dan digunakan oleh Anggota DPR RI dengan didukung juga dengan pengembangan dan penambahan jaringan internet untuk Anggota DPR RI di seluruh wilayah DPR RI, pengembangan infrastruktur jaringan internet, dan pengembangan teknologi keamanan informasi. Sedangkan untuk jumlah aplikasi yang terintegrasi selama tahun 2024 telah mencapai 97,33% yang terdiri dari 108 aplikasi yang digunakan baik oleh Anggota DPR RI maupun Pegawai Sekretariat Jenderal.

Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan yang telah disediakan oleh Pusat Teknologi Informasi diperoleh melalui survei kepuasan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024 dengan kategori teknologi informasi yang memberikan hasil IKM 93,92 (Sangat Baik) dengan Nilai Indeks sebesar 3,76 dari target 3,32.

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat Teknologi Informasi yang telah dilakukan oleh dua Bidang unit kerja yakni Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi memberikan kenaikan capaian realisasi penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2024 dengan capaian sebesar 99,69% dan realisasi anggaran keseluruhan Rp 80.123.334.646,-.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari, Pusat Teknologi Informasi pun tak luput dari kendala yang terjadi, baik kendala teknis maupun non-teknis. Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan (STELA), kendala teknis yang dialami selama tahun 2024 mencakup adanya laporan sebanyak 2042 aduan, dengan 1023 di antaranya terkait masalah jaringan dan internet. Beberapa kendala teknis lainnya meliputi kerusakan perangkat infrastruktur salah satunya akibat dari tersambar petir dan rusaknya jaringan kabel yang disebabkan oleh faktor eksternal lainnya.

Sedangkan kendala non teknis yang dialami oleh Pusat Teknologi Informasi diantaranya, terbatasnya jumlah SDM di Pusat Teknologi Informasi sering kali

menghambat pelaksanaan kegiatan secara optimal, baik dalam proyek-proyek yang terkait pemeliharaan infrastruktur, pengembangan aplikasi, maupun tata kelola teknologi informasi. Selain itu, ketergantungan pada mitra kerja atau pihak ketiga terkait konsultasi teknis, kerap menyebabkan pekerjaan tidak selesai sesuai timeline yang telah ditetapkan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Gambaran Umum

Sebagai bagian dari unit pendukung teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan layanan teknologi informasi yang handal, inovatif, dan adaptif untuk mendukung kinerja DPR RI. Pustekinfo terus berupaya meningkatkan tata kelola teknologi informasi berbasis prinsip good governance dan nilai-nilai Ber-AKHLAK. Dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR RI, Pustekinfo menjalankan berbagai inisiatif strategis yang berfokus pada optimalisasi layanan digital, pengembangan aplikasi, serta penyediaan infrastruktur teknologi yang aman dan efisien.

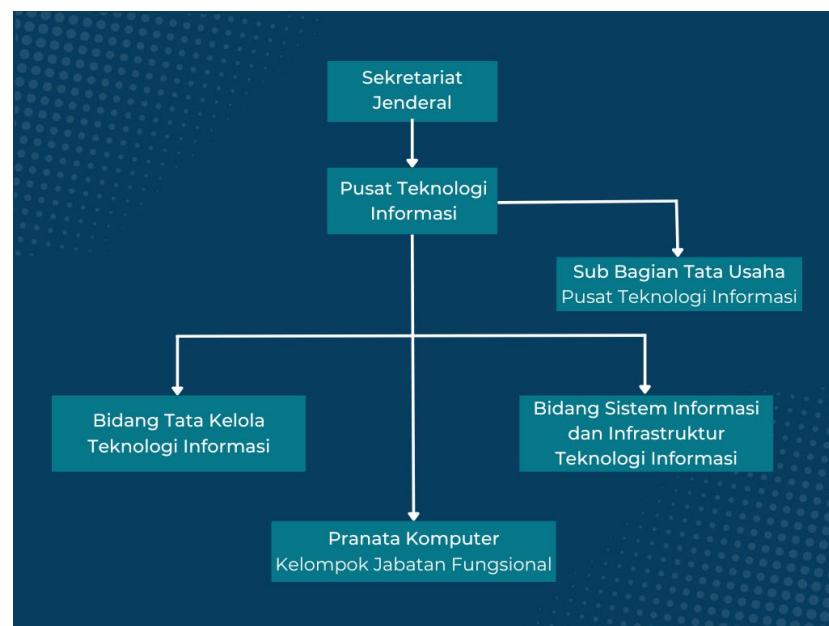
Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi, Pustekinfo setiap tahun menyusun Laporan Kinerja (LK) yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Laporan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam mencapai target, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan kinerja di tahun mendatang. Selain itu, laporan ini menjadi media komunikasi pencapaian Pustekinfo kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Penerapan prinsip Ber-AKHLAK seperti orientasi pada pelayanan, akuntabilitas, dan kolaborasi antar unit kerja juga menjadi pilar utama dalam setiap aktivitas Pustekinfo. Setiap layanan dan inisiatif yang dijalankan bertujuan untuk berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja DPR RI, serta memberikan pengalaman terbaik bagi para pengguna layanan teknologi informasi. Laporan ini juga mencerminkan komitmen Pustekinfo terhadap profesionalisme dan transparansi dalam menyampaikan hasil pencapaian serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilaksanakan.

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan ke-2 atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan ke-4 atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Satu Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
7. SK Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1787/SEKJEN/2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

### 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi



**Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Teknologi Informasi Setjen DPR RI**

(Sumber: Setjen DPR RI, 2021)

Pusat Teknologi Informasi mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun tugas Pusat Teknologi Informasi adalah melaksanakan tata kelola teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi, Pusat Teknologi Informasi memiliki fungsi:

- penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Pusat Teknologi Informasi;
- penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata Kelola teknologi informasi;
- pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi;
- pelaksanaan tata kelola teknologi informasi;
- pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi;
- dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang teknologi informasi;
- pelaksanaan tata usaha Pusat Teknologi Informasi;

- penyusunan laporan kinerja Pusat Teknologi Informasi; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal.

Dengan dibantu oleh 2 unit bidang Eselon III di Pusat Teknologi Informasi dan 1 subbagian tata usaha Pusat Teknologi Informasi Eselon IV, pelaksanaan kegiatan dan operasional layanan teknologi informasi dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi bidang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 06/PER-SEKJEN/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Pasal 336 dan Pasal 337.

### **1.3.1. Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi**

Bertugas melaksanakan penyusunan rencana induk teknologi informasi, kebijakan teknis dan standardisasi di Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, manajemen pengamanan teknologi informasi, pengelolaan data dan analitiknya, serta dukungan teknis operasional penggunaan layanan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi;
2. penyusunan bahan kegiatan di Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, manajemen pengamanan teknologi informasi, pengelolaan data dan analitiknya, serta dukungan teknis operasional pengguna layanan teknologi informasi;
3. pelaksanaan dan evaluasi tata kelola teknologi informasi, layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, manajemen pengamanan teknologi informasi, pengelolaan data dan analitiknya, serta dukungan teknis operasional pengguna layanan teknologi informasi;
4. pelaksanaan bimbingan dan supervisi terkait pembangunan dan pengembangan layanan teknologi informasi; dan

- 
- 
5. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi.

### **1.3.2. Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi**

Bertugas melaksanakan pengelolaan di bidang pembangunan dan pengembangan aplikasi, sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur teknologi informasi, fasilitas pusat data, dan jaringan komputer, serta area teknologi informasi khusus. Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi;
2. penyusunan bahan kegiatan di bidang pembangunan dan pengembangan aplikasi, sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur, fasilitas pusat data, dan jaringan komputer, serta area teknologi informasi khusus;
3. pelaksanaan, pengujian dan evaluasi pembangunan dan pengembangan aplikasi, sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur, fasilitas pusat data, dan jaringan komputer, serta area teknologi informasi khusus;
4. pelaksanaan pemeliharaan, identifikasi, analisis, pemulihan gangguan dan permasalahan aplikasi, sistem informasi yang terintegrasi, infrastruktur teknologi informasi, layanan pusat data, dan jaringan komputer;
5. pengelolaan aset teknologi informasi; dan
6. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi.

### **1.3.3. Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi**

Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Pusat Teknologi Informasi, bidang, dan kelompok jabatan fungsional.

#### 1.3.4. Komposisi Pegawai Pusat Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan kegiatan dukungan layanan teknologi informasi, Pusat Teknologi Informasi memiliki kapasitas sumber daya manusia yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, penyusun bahan kebijakan, pengelola data, dan pegawai non ASN.

Apabila peran pejabat struktural sebagai posisi sentral yang menghubungkan antara lini depan dan lini atas, maka peran dari pejabat fungsional pranata komputer adalah sebagai pelaksana teknis operasional layanan teknologi informasi. Kedua peran ini dibantu oleh dukungan secara administratif oleh sub bagian tata usaha dan dukungan pelaksanaan kegiatan teknis oleh pegawai non ASN. Adapun secara rinci, komposisi pegawai Pusat Teknologi Informasi dan kebutuhan sesuai analisis beban kerja tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 1 Jumlah Pegawai Pusat Teknologi Informasi**

NAMA JABATAN	SDM	KEBUTUHAN ABK
Kepala Pusat Teknologi dan Informasi	0	1
Pranata Komputer Ahli Madya	3	8
Analis Kebijakan Ahli Pertama	0	1
Statistisi Ahli Madya	0	1
	3	11

NAMA JABATAN	SDM	KEBUTUHAN ABK
Kepala Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi	1	1
Pranata Komputer Ahli Muda	3	7
Pranata Komputer Ahli Pertama	2	12
Pranata Komputer Penyelia	0	2
Pranata Komputer Mahir	0	4
Pranata Komputer Terampil	3	6
Statistisi Ahli Muda	0	4
Statistisi Ahli Pertama	0	8
Pengadministrasi Perkantoran	0	2
	9	46

NAMA JABATAN	SDM	KEBUTUHAN ABK
Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi	1	1
Pranata Komputer Ahli Muda	3	7
Pranata Komputer Ahli Pertama	4	16
Pranata Komputer Penyelia	0	2
Pranata Komputer Mahir	0	7
Pranata Komputer Terampil	3	12
Pengadministrasi Perkantoran	0	2
	<b>11</b>	<b>47</b>

NAMA JABATAN	SDM	KEBUTUHAN ABK
Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi	1	1
Penelaah Teknis Kebijakan	2	2
Penata Layanan Operasional	0	1
Pengolah Data dan Informasi	1	3
Pengadministrasi Perkantoran	0	2
Arsiparis Terampil	0	1
Operator Layanan Operasional	0	2
	<b>4</b>	<b>12</b>

REKAPITULASI TOTAL	SDM	KEBUTUHAN ABK
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,	3	4
Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas		
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana	24	112
	<b>27</b>	<b>116</b>

NAMA JABATAN	SDM
TSP	19
Fungsional Bebas Tugas karena Tugas Belajar	1
	<b>20</b>

Jumlah keseluruhan pegawai di Pusat Teknologi Informasi adalah 27 orang yang terdiri dari 2 Kepala Bidang, 1 Kepala Subbagian Tata Usaha, 3 Pelaksana, dan 21 Pranata Komputer yang terdiri dari berbagai jenjang Pranata Komputer Terampil hingga Madya dengan konsentrasi lingkup kompetensi yang meliputi Tata Kelola Teknologi Informasi, Aplikasi Sistem Informasi, Infrastruktur, Jaringan Komputer dan Keamanan Informasi.

Berdasarkan surat Menteri PANRB nomor B/2458/M.SM.01.00/2024 tanggal 31 Mei 2024, telah disetujui untuk kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia, yaitu Pranata Komputer Ahli Madya sebanyak 8 orang, Pranata Komputer Ahli Muda sebanyak 14 orang, Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 28 orang, Pranata Komputer Penyelia sebanyak 4 orang, Pranata Komputer Mahir sebanyak 11 orang dan Pranata Komputer Terampil sebanyak 18 orang dengan total keseluruhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebanyak 83 orang. Kemudian jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer ini dibagi menjadi dua bidang dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan kebutuhan Pusat Teknologi Informasi.

Pada Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi, kebutuhan terhadap pegawai Pranata Komputer Ahli Muda sebanyak 7 orang, Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 12 orang, Pranata Komputer Penyelia sebanyak 2 orang, Pranata Komputer Mahir 4 orang, dan Pranata Komputer Terampil 6 orang. Kekurangan SDM Pranata Komputer di Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi masih terdapat 23 orang.

Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi kebutuhan Pranata Komputer Ahli Muda sebanyak 7 orang, Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 16 orang, Pranata Komputer Penyelia sebanyak 2 orang, Pranata Komputer Mahir 7 orang, dan Pranata Komputer Terampil 12 orang. Kekurangan SDM Pranata Komputer di Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi masih terdapat 34 orang. Oleh karena itu pada tahun 2024 diberdayakan Tenaga Sistem Pendukung (TSP) sebanyak 19 orang untuk

membantu dalam hal operasional teknis dan administratif penanganan gangguan layanan teknologi informasi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang menjelaskan bahwa setiap instansi diperlukan SDM Bidang Statistik untuk melakukan pengelolaan kegiatan statistik sektoral, maka telah dilakukan penghitungan beban kinerja terkait kegiatan statistik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang menyimpulkan diperlukannya Jabatan Fungsional Statistisi sebanyak 13 orang. Berdasarkan surat Menteri PANRB nomor B/4707/M.SM.01.00/2024 tanggal 3 September 2024, telah disetujui kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu Statistisi Ahli Madya sebanyak 1 orang, Statistisi Ahli Muda sebanyak 4 orang, dan Statistisi Ahli Pertama sebanyak 8 orang dengan total sebanyak 13 orang. Namun saat ini belum ada SDM yang menjabat jabatan tersebut.

Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di Pusat Teknologi Informasi DPR RI adalah dengan melaksanakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2024. Dalam rekrutmen tersebut, direncanakan akan ada penambahan sebanyak 12 orang untuk mengisi Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama dan 4 orang untuk Jabatan Fungsional Pranata Komputer Terampil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan teknologi informasi di lingkungan DPR RI.

Sejak tanggal 4 Juni 2024, posisi Kepala Pusat Teknologi Informasi DPR RI belum terisi karena tidak ada pejabat definitif yang menduduki posisi tersebut. Untuk menjaga keberlangsungan tugas dan fungsi Pusat Teknologi Informasi, Deputi Bidang Administrasi telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Teknologi Informasi. Hingga waktu penyusunan laporan ini, jabatan tersebut masih berada dalam status pelaksana tugas.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020-2024 yang telah dilakukan perubahan revisi ke-2 per Oktober 2023, disusun berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu dan mendukung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Di dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus mengacu kepada visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diterjemahkan secara nyata dan aplikatif di dalam Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang modern, terbuka, aspiratif, dan berintegritas, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus menjadi *supporting system* yang profesional dan modern. Salah satu upaya mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan-perbaikan melalui serangkaian upaya terpadu di sektor birokrasi yang meliputi tata kelola pemerintahan yang berkualitas, terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik, dan peningkatan kualitas pelayanan kedewanan.

Terlaksananya keterbukaan informasi dan pemerintah berbasis elektronik, dengan indikator kinerja program Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) ini diturunkan sebagai sasaran program dan indikator kinerja Pusat Teknologi Informasi yang dijabarkan dalam target mencapai indeks “Sangat Baik” pada tahun 2024. Sehingga Pusat Teknologi Informasi harus mampu meningkatkan indeks SPBE ini karena pada tahun sebelumnya di 2023 telah mengalami peningkatan dengan berhasil meraih indeks sebesar 3,57 dengan predikat “Sangat Baik”.

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pusat Teknologi Informasi memiliki target pada sasaran program Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

**Tabel 2 Target Sasaran Program 3 pada Perubahan Renstra Setjen DPR 2021-2024**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Renstra			
		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik	Baik	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,6)

(Sumber: Renstra Setjen DPR 2020-2024 Revisi Ke-2)

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pusat Teknologi Informasi telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dengan Sekretaris Jenderal DPR RI. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi tahun 2024 seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 3 Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2022-2024**

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI					
Sasaran Program	Indikator	Target PK			2024
		2022	2023	2024	
<b>Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik</b>	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,6)	
<b>Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi</b>	a. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	85%	90%	91%	
	b. Persentase aplikasi yang terintegrasi	90%	95%	96%	
	c. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,10	3,31	3,32	
	d. Persentase realisasi anggaran	92,5%	93%	98%	

Satker/Program/Kegiatan	Anggaran pada PK		
	2022	2023	2024
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	Rp. 57.365.474.000	Rp. 57.672.789.000	Rp. 80.426.754.000

Penetapan target pada indikator Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selaras dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Setjen DPR tahun 2021-2024 Revisi Ke-2. Sedangkan target indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan sebesar 91% pada Perjanjian Kinerja tahun 2024, indikator Persentase aplikasi yang terintegrasi ditargetkan sebesar 96%, indikator Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi memiliki target 3,32, dan indikator Persentase realisasi anggaran ditargetkan sebesar 98%.

Penetapan target indikator kinerja pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi untuk indikator Persentase dukungan teknologi

informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2024, dijabarkan menjadi kegiatan pada rencana aksi melalui ketersediaan aplikasi dan sistem informasi yang dimanfaatkan dan digunakan oleh Anggota DPR RI dengan didukung juga kegiatan pengembangan dan penambahan jaringan internet untuk Anggota DPR RI di seluruh wilayah DPR RI, pengembangan infrastruktur jaringan internet, dan pengembangan teknologi keamanan informasi.

Sedangkan penetapan target indikator kinerja untuk jumlah aplikasi yang terintegrasi selama tahun 2024 telah mencapai 97,33% yang terdiri dari 108 aplikasi yang ada di DPR RI.

Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi diturunkan dan dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja Bidang yang diukur dengan menggunakan satuan-satuan target yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Tingkat pencapaian target kinerja ini selanjutnya akan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang.

Untuk memudahkan dalam pengukuran, tingkat capaian sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja secara kuantitas dan kualitas/mutu. Secara kuantitas, setiap target indikator kinerja diukur dengan menggunakan satuan dokumen. Semua *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh unit kerja memiliki dokumen hasil kerja dalam bentuk fisik, laporan atau catatan atas *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator kinerja merupakan acuan ukuran kinerja dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja di lingkungan Pusat Teknologi Informasi.

**Tabel 4 Skala Nilai Peringkat Kinerja dan Kategori**

	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% $\leq$ 100%	Sangat Tinggi
2	76% $\leq$ 90%	Tinggi
3	66% $\leq$ 75%	Sedang
4	51% $\leq$ 65%	Rendah
5	$\leq$ 50%	Sangat Rendah

(Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)

Tabel berikut memperlihatkan target kinerja, realisasi dan capaian Pusat Teknologi Informasi pada tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 5 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Teknologi Informasi Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

PERJANJIAN KINERJA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI					
Sasaran Program	Indikator	Target PK	Realisasi 2024	Capaian	Kategori
Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sangat Baik (3,6)	Memuaskan (4,23)	117,5%	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	a. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	91%	96,25%	105,8%	Sangat Tinggi

PERJANJIAN KINERJA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI					
Sasaran Program	Indikator	Target PK	Realisasi 2024	Capaian	Kategori
	b. Persentase aplikasi yang terintegrasi	96%	97,33%	101,4%	Sangat Tinggi
	c. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,32	3,76	113,25%	Sangat Tinggi
	Nilai IKPA Pusat Teknologi Informasi	87,50	82,97	94,82%	Sangat Tinggi
	• Revisi DIPA	7,00	7,00	100%	Sangat Tinggi
	• Deviasi Halaman III DIPA	8,00	7,08	88,5%	Tinggi
	• Penyerapan Anggaran	17,5	17,12	97,83%	Sangat Tinggi
	• Belanja kontraktual	10,00	9,99	99,9%	Sangat Tinggi
	• Penyelesaian Tagihan	10,00	10,00	100%	Sangat Tinggi
	• Capaian Output	25,00	23,49	93,96%	Sangat Tinggi
	• Pengelolaan Uang Muka Kegiatan dan KKP	10,00	-	-	-
	d. Persentase realisasi anggaran	98%	99,69%	101,72%	Sangat Tinggi

(Sumber: Pusat Teknologi Informasi 2024)

Berdasarkan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA Mini Sekretaris Jenderal DPR RI yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2024, terdapat penambahan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk Unit Kerja Tingkat Eselon II satuan kerja, yaitu “Pengelolaan Uang Muka Kegiatan dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)”. Indikator tersebut belum dijalankan di tahun 2024 sehingga tidak dapat ditarik realisasinya.

Penyesuaian arah kebijakan dan strategi yang telah disesuaikan dengan Revisi Ketiga Road Map RB Setjen DPR RI 2020-2024, Pusat Teknologi Informasi berperan dalam

mencapai target untuk Sasaran Strategis RB yaitu Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel dengan Arah Kebijakan yang dipetakan ke dalam kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 6 Kegiatan Utama dan Indikator dari Sasaran Program Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik**

RENSTRA SETJEN DPR RI TAHUN 2021-2024 (PERUBAHAN)			
Sasaran Program	Arah Kebijakan	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama
Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pelaksanaan data statistik sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	a. Indeks SPBE b. Tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE

Kegiatan yang merupakan implementasi dari penyesuaian terhadap Revisi Road Map RB Setjen DPR RI ini dijabarkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2024 yakni pada kegiatan utama Pelaksanaan data statistik sektoral dengan Indikator Kegiatan Utama yang pertama yakni Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral melalui evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Setjen DPR RI pada aplikasi EPSS Badan Pusat Statistik.

Kegiatan yang kedua adalah pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional dengan Indikator Kegiatan Utama Tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE dilakukan dengan penggunaan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE V2 dari KemenPAN-RB untuk ketersediaan Arsitektur SPBE DPR RI yang terdiri dari Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Arsitektur Keamanan.

Penetapan target pada Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi sudah selaras dengan target pada Renstra tahun 2024. Jika disandingkan antara target Renstra untuk tahun 2024 dengan realisasi di tahun 2024 ini, hasil capaiannya

memenuhi target yang diharapkan dan masih dalam kategori sangat tinggi seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 7 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja pada Program Pengelolaan Teknologi Informasi berdasarkan Renstra Setjen DPR RI 2021-2024**

RENSTRA SETJEN DPR RI TAHUN 2021-2024 (PERUBAHAN) PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI					
Sasaran Program	Indikator	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi 2024	Capaian	Kategori
Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sangat Baik (3,6)	Memuaskan (4,23)	117,5%	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	a. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	91%	96,25%	105,8%	Sangat Tinggi
	b. Persentase aplikasi yang terintegrasi	96%	97,33%	101,4%	Sangat Tinggi
	c. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,32	3,76	113,25%	Sangat Tinggi
	d. Nilai IKPA Pusat Teknologi Informasi	87,50	82,97	94,82%	Sangat Tinggi
	• Revisi DIPA	7,00	7,00	100%	Sangat Tinggi
	• Deviasi Halaman III DIPA	8,00	7,08	88,5%	Tinggi
	• Penyerapan Anggaran	17,5	17,12	97,83%	Sangat Tinggi

RENSTRA SETJEN DPR RI TAHUN 2021-2024 (PERUBAHAN) PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI					
Sasaran Program	Indikator	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi 2024	Capaian	Kategori
	• Belanja kontraktual	10,00	9,99	99,9%	Sangat Tinggi
	• Penyelesaian Tagihan	10,00	10,00	100%	Sangat Tinggi
	• Capaian Output	25,00	23,49	93,96%	Sangat Tinggi
	• Pengelolaan Uang Muka Kegiatan dan KKP	10,00	-	-	-
e.	Persentase realisasi anggaran	98%	99,69%	101,72%	Sangat Tinggi

Terdapat 5 (lima) indikator kinerja dalam 2 (dua) sasaran program yang ditargetkan oleh Pusat Teknologi Informasi pada tahun 2024, yakni “Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik” dan “Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi”.

Kinerja yang diharapkan merupakan *outcome* yang berkesinambungan hasil dari rangkaian perencanaan kegiatan, pedoman, dan pelaksanaan, serta evaluasi. Indikator yang terukur akan menghasilkan benang merah dari setiap tahapan tersebut, dan dapat memberikan rekomendasi demi perbaikan di masa yang akan datang secara berkesinambungan.

**Tabel 8 Perbandingan Target Akhir 2024 dengan Capaian 2024**

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI					
Sasaran Program	Indikator	Target Akhir Tahun 2024	Realisasi 2024	Capaian	Kategori
Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Sangat Baik (3,6)	Memuaskan (4,23)	117,5%	Sangat Tinggi

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI					
Sasaran Program	Indikator	Target Akhir Tahun 2024	Realisasi 2024	Capaian	Kategori
	Berbasis Elektronik				
Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	1. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	91%	96,25%	105,8%	Sangat Tinggi
	2. Persentase aplikasi yang terintegrasi	96%	97,33%	101,4%	Sangat Tinggi
	3. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,32	3,76	113,25%	Sangat Tinggi

### 3.1. Sasaran Program Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pada sasaran program terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik terdapat 1 (satu) indikator kinerja yakni **“Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”** yang dilaksanakan melalui evaluasi SPBE DPR RI.

#### 3.1.1. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian SPBE tahun 2024, Setjen DPR RI mendapatkan indeks nilai 4,23 (Memuaskan). Sehingga jika dibandingkan dengan target yang ada pada Renstra Setjen DPR RI Tahun 2021-2024 dan Perjanjian Kinerja, maka hasil capaiannya sebesar 117,5% (Sangat Tinggi).

**Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

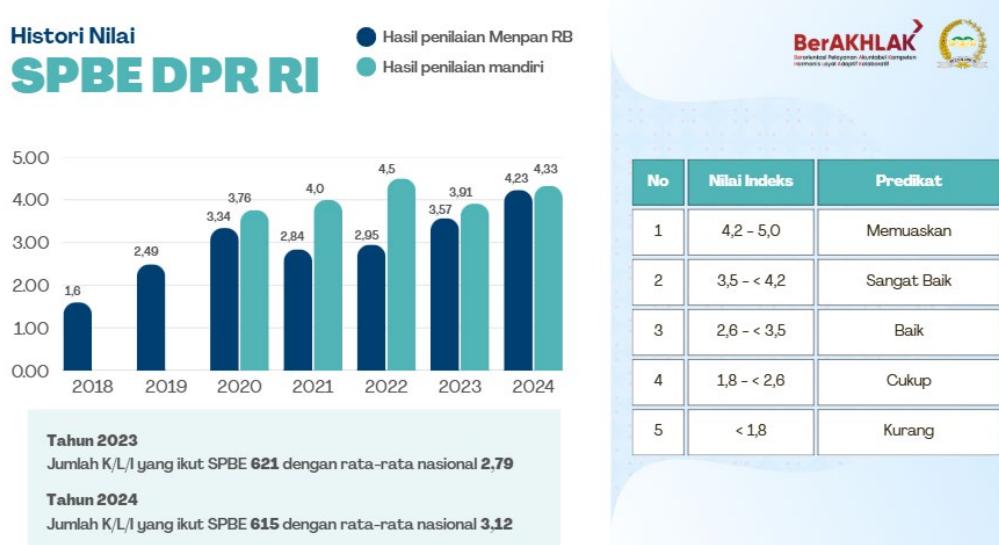
Indikator Kinerja : Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori
Sangat Baik (3,6)	Sangat Baik (3,6)	Memuaskan (4,23)	117,5%	Sangat Tinggi

### 3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

**Tabel 10 Perbandingan Capaian Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari Tahun ke Tahun**

Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Baik	Baik (2,95)	100%	Sangat Baik (3,5)	Sangat Baik (3,57)	102%	Sangat Baik (3,6)	Memuaskan (4,23)	117,5%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian indeks pelaksanaan SPBE selama 3 tahun terakhir diketahui bahwa pada hasil SPBE tahun 2024 capaian realisasi sudah melebihi target yang diharapkan di tahun 2024. Perolehan angka indeksnya pada indikator SPBE di tahun 2023 mengalami kenaikan dari 3,57 menjadi 4,23 pada tahun 2024 dengan predikat “Memuaskan”.



**Gambar 2 Histori Penilaian SPBE DPR RI**

Pada bulan Juli 2024 pengumpulan *evidence* untuk penilaian SPBE tahun 2024 mulai dilakukan. Proses pengumpulan *evidence* SPBE dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit kerja lain sesuai dengan indikator-indikator terkait unit kerja tersebut. Unit kerja yang terlibat selain Pusat Teknologi Informasi adalah Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, Bagian Perencanaan, Bagian Administrasi Keuangan, Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN, Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi ASN, Bagian Administrasi Inspektorat Utama, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Arsip, Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Bagian Pengaduan Masyarakat, Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum, dan Pusat Perancangan Undang-Undang.

Koordinasi penyelenggaraan SPBE telah diinisiasi sejak awal tahun 2024 dengan dilakukannya bimbingan teknis terkait pengisian arsitektur SPBE DPR RI bersama PAN-RB. Setelah itu kegiatan pengisian arsitektur SPBE DPR RI menggunakan aplikasi Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE yang telah disediakan oleh KemenPAN-RB dapat efektif dilakukan setelah terdapat Peta Rencana As-Is dan To-Be dari RITIK 2025-2027. Kegiatan ini cukup memakan waktu karena data yang perlu diinput ke dalam sistem cukup banyak untuk nantinya dapat terlihat *dependency* antar data.

*Evidence* SPBE yang sudah terkumpul, di-*submit* ke sistem yang sudah disiapkan KemenPAN-RB pada tanggal 25 Agustus 2024. Kemudian tim penilai SPBE melakukan penilaian serta melakukan interview untuk konfirmasi data *evidence* pada tanggal 28 Oktober 2024. Setelah interview, DPR RI diberi kesempatan untuk melakukan submit revisi data *evidence* pada tanggal 4 November 2024. Kemudian Kegiatan Pelaksanaan Visitasi Penilaian SPBE Setjen DPR RI oleh KemenPAN RB dan Tim Asesor dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024 di Ruang Command Center, Gedung Nusantara Lantai 1, DPR RI.

Dalam rangka meningkatkan implementasi SPBE DPR RI, maka telah dilakukan evaluasi terhadap beberapa kebijakan maupun pedoman yang terkait serta menyusun turunan dari kebijakan tersebut seperti dalam bentuk Instruksi

maupun SOP. Kebijakan maupun pedoman yang telah dilakukan evaluasi antara lain dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Tahun 2020-2024 untuk kemudian disusun RITIK tahun 2025-2027, SK No. 2081/SEKJEN/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi, SK No. 2082/SEKJEN/2023 tentang Kebijakan Umum Audit TIK, SK No. 2083/SEKJEN/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan, serta SK No. 2084/SEKJEN/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Data. Selain itu telah disusun juga kebijakan tata kelola teknologi informasi berupa SOP.

### **3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Pada Renstra**

**Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra
1.	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Memuaskan (4,23)	Sangat Baik (3,6)	117,5%

Untuk indikator Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memperoleh capaian akhir Renstra sebesar 117,5% jika dibandingkan dengan target akhir yang terdapat pada Renstra Setjen DPR RI tahun 2021-2024.

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi target akhir tersebut antara lain dengan menjalankan catatan rekomendasi hasil penilaian SPBE dan melaksanakan kegiatan penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan berkolaborasi dengan unit kerja lainnya melalui pembentukan Tim Koordinasi SPBE Tahun 2024 yang ditetapkan dengan SK Nomor 371/SEKJEN/2024.

### 3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

**Tabel 12 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional SPBE**

Sasaran Program: Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik			
Indikator: Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Rata-Rata Nasional 2024	Realisasi 2024	Capaian	Kategori
3,12	4,23	135,57%	Memuaskan

Perbandingan nilai indeks SPBE yang diperoleh Setjen DPR RI jika dibandingkan dengan standar nasional, diperoleh hasil bahwa nilai SPBE Setjen DPR RI Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai nasional SPBE yang sebesar 3,12.

Berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 dari Kementerian PAN-RB, untuk kategori Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, DPR menempati posisi ke-1 tertinggi dari 8 Lembaga dengan predikat "Memuaskan". Namun demikian, tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan senantiasa dilakukan untuk dapat mengoptimalkan penerapan SPBE di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

**Tabel 13 Hasil Penilaian SPBE Tahun 2024 Kategori Sekretariat Jenderal Lembaga Negara**

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	4,23	Memuaskan
2	Kejaksaan Agung	4,13	Sangat Baik
3	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	3,91	Sangat Baik
4	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	3,81	Sangat Baik
5	Sekretariat Mahkamah Agung RI	3,52	Sangat Baik
6	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	3,00	Baik
7	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	2,99	Baik
8	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	2,65	Baik
<b>Rata-Rata</b>		<b>3,53</b>	

(Sumber: KepmenPAN-RB Nomor 663 Tahun 2024)

### 3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

**Tabel 14 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sangat Baik (3,6)	Memuaskan (4,23)	117,5%	Faktor pendukung keberhasilan, yaitu: a. Melakukan kolaborasi dengan K/L lain dengan melakukan integrasi aplikasi menggunakan API; b. Melakukan klarifikasi daftar data dalam rangka pembangunan satu data; c. Pelaksanaan Forum Satu Data DPR; d. Pelaksanaan audit Keamanan SPBE internal yang berkolaborasi dengan Inspektorat Utama dan BSSN; e. Melakukan penyusunan Arsitektur SPBE pada aplikasi SIA SPBE V2 KemenPAN-RB.	a. Meningkatkan penerapan manajemen aset TIK dengan penggunaan aplikasi DigitAll untuk pengelolaan aset TIK b. Meningkatkan penerapan manajemen risiko SPBE terhadap unit kerja (UPR) dengan penyelarasan SK Petunjuk Teknis Manajemen Risiko TI dengan PermenPAN RB 5/2020 serta dilakukan perbaikan form Risk Register TI c. Menyusun dan menerapkan pedoman pengelolaan perubahan layanan TIK yaitu SK Penerapan Manajemen Layanan Teknologi Informasi yang dirancang berdasarkan Standar ISO 20000 di mana terdapat panduan dalam mengelola setiap perubahan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
							<p>terkait layanan TIK</p> <p>d. Mengukur utilitas aplikasi/sistem informasi dengan melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas dan kontribusi berbagai aplikasi dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi</p> <p>e. Menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Setjen DPR RI Tahun 2025-2027 yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional</p>

### 3.1.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 15 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian (CI)	Pagu Anggaran (PA)	Realisasi Anggaran (RA)	% Capaian
1.	Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sangat Baik (3,6)	Memuaskan (4,23)	117,5%	6.846.352.000	6.733.864.374	98,36%

$$\text{Efisiensi Anggaran} = \frac{((\text{PA} \times \text{CI}) - \text{RA})}{(\text{PA} \times \text{CI})} \times 100\%$$

**Efisiensi Anggaran =  $((6.846.352.000 \times 117,5\%) - 6.733.864.374) \times 100\% = 16,29\%$**   
**( $6.846.352.000 \times 117,5\%$ )**

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi di atas, indikator kinerja Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki tingkat efisiensi sebesar 16,29% masih di dalam *range* batas maksimal sebesar 20% dan batas minimal sebesar -20%. Tingkat efisiensi tersebut menandakan penggunaan sumber daya yang digunakan telah efisien.

Namun demikian, PMK No. 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK No. 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK No. 62/2023, yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} E &= (\text{Cost per Unit Realisasi} / \text{Cost per Unit Target}) \times 100\% \\ &= ((\text{realisasi anggaran}/\text{realisasi output}) / (\text{pagu anggaran}/\text{target output})) \times 100\% \\ &= ((6.733.864.374/4,23) / (6.846.352.000/3,6)) \times 100\% \\ &= (1.591.930.112 / 1.901.764.444) \times 100\% \\ &= 84\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan capaian indikator Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 84%.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik” dengan indikator kinerja “Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut tercapai dengan kategori tinggi dan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 98,36%.

Adapun kegiatan yang diselenggarakan dengan penggunaan pengadaan lisensi Visualisasi Data Analitik, *managed service* pengembangan *machine learning* berbasis GPU, jasa konsultan penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi DPR RI, jasa konsultan pelaksanaan Audit Surveillance ISO 27001, jasa

konsultan perancangan Business Continuity Plan layanan TI, jasa konsultan perencanaan manajemen risiko dan aset TI, jasa konsultan perencanaan Manajemen Layanan TI, jasa konsultan pelaksanaan Audit ISO 20000, jasa konsultan SOP keamanan informasi, jasa konsultan penyusunan Arsitektur SPBE As-Is dan To-Be, jasa konsultan perancangan sistem IoT, jasa konsultan evaluasi RITIK, penyelenggaraan Forum Satu Data DPR RI, penyelenggaraan *Computer Incident Response and Recovery Simulation*, serta *Managed Operation Service Big Data*.

Adapun dalam pencapaian indikator ini juga dimanfaatkan penggunaan sumber daya lainnya dalam pelaksanaan dukungan layanan SPBE, seperti:

1. pembentukan Tim Koordinasi SPBE Tahun 2024 yang ditetapkan dengan SK Nomor 371/SEKJEN/2024 untuk memudahkan koordinasi dan pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian mandiri SPBE;
2. penggunaan OneDrive pada 365.dpr.go.id sebagai media mengumpulkan bukti dukung dan berbagi dokumen digital sehingga menunjang penerapan teknologi informasi dan mengurangi penggunaan kertas; dan
3. pelaksanaan rapat koordinasi SPBE dengan jalur virtual sehingga dapat lebih efektif karena mendukung kebutuhan portabilitas yang tinggi.

### **3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Teknologi Informasi selama tahun 2024 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”, yaitu:

#### **1. Evaluasi SPBE Tahun 2024**

Sekretariat Jenderal DPR RI telah mengikuti Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 dengan serangkaian langkah strategis, seperti rapat koordinasi antar unit, evaluasi kebijakan internal, integrasi aplikasi dengan sistem internal maupun eksternal, serta optimalisasi penggunaan aplikasi umum. Evaluasi ini juga mencakup tahap wawancara mendalam (interviu) untuk

menilai penerapan SPBE secara komprehensif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI meraih nilai 3,57 dengan kategori "Sangat Baik." Peningkatan ini mengantarkan Sekretariat Jenderal DPR RI meraih penghargaan bergengsi dalam acara Digital Government Award SPBE Summit 2024 sebagai *Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terbaik pada Kategori Lembaga Pemerintahan*.



**Gambar 3 Penghargaan untuk Sekretariat Jenderal DPR RI Pada Acara Digital Government Award SPBE Summit 2024**

## 2. Audit Surveillance ISO/IEC 27001:2022

Kegiatan Audit Surveillance ISO 27001:2022 yang berlangsung di bulan Juni 2024 bertujuan memastikan keberlanjutan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022, yang berfokus pada penerapan sistem manajemen keamanan informasi dalam ruang lingkup aplikasi Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan (STELA). Hasil positif dari audit ini menunjukkan bahwa Pusat Teknologi Informasi telah berhasil mempertahankan standar keamanan informasi internasional, yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem yang dikelola, tetapi juga mendukung tercapainya tata kelola TIK yang andal, transparan, dan efisien sesuai dengan sasaran kinerja SPBE.



**Gambar 4 Hasil Audit Surveillance ISO/IEC 27001:2022**

### **3. Audit Internal TIK dengan Inspektorat, Didampingi oleh BRIN**

Setjen DPR RI telah melakukan Audit Infrastruktur dan Aplikasi (khusus) sesuai dengan pedoman Audit yang berlaku, dan telah dilakukan secara rutin pada tahun 2022 dan 2024 serta pemeriksannya sudah meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan, dilaksanakan oleh auditor TIK Internal Setjen DPR RI yang berkolaborasi dengan Inspektorat Utama dengan menyusun SK Tim Audit TIK Internal dan menggunakan tools/kertas kerja dari BRIN.



**Gambar 5 Audit Internal TIK dengan Inspektorat, didampingi oleh BRIN**

#### **4. Forum Satu Data DPR RI: Penguatan Tata Kelola dan Integrasi Data untuk Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas**

Pelaksanaan Forum Satu Data DPR RI pada 9 Desember 2024 oleh Pusat Teknologi Informasi menjadi langkah strategis yang mendukung SPBE. Kegiatan ini sejalan dengan program nasional Satu Data Indonesia yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan interoperabilitas data, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses data dan informasi yang dimiliki DPR RI. Forum ini memperkuat tata kelola dan integrasi data, mendukung transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat komitmen DPR RI dalam menyediakan data yang mudah diakses dan relevan bagi masyarakat.



**Gambar 6 Forum Satu Data DPR RI: Penguatan Tata Kelola dan Integrasi Data untuk Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas**

#### **5. Penyusunan RITIK Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2027**

Kegiatan penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Setjen DPR RI Tahun 2025-2027 menjadi salah satu upaya strategis yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Proses penyusunan ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari

*pre-kickoff meeting* pada Agustus 2024, asesmen terhadap 21 unit kerja, hingga koordinasi terkait infrastruktur dan analisis kesenjangan. Hasil asesmen mencakup kebutuhan teknologi informasi, permasalahan pengelolaan data, serta pengembangan roadmap digital yang mencakup aspek strategis seperti layanan, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan. Dokumen RITIK ini diharapkan menjadi landasan transformasi digital yang selaras dengan kebutuhan organisasi.

*Kickoff meeting* RITIK pada November 2024, yang dihadiri pejabat eselon 1, menandai pencapaian signifikan dalam penyusunan dokumen RITIK. Pertemuan ini memastikan bahwa rancangan RITIK mendukung visi pembangunan SPBE dengan fokus pada layanan digital yang terintegrasi, aman, dan inovatif. Dengan penyusunan RITIK yang komprehensif, Setjen DPR RI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola TIK, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong pengembangan layanan berbasis elektronik yang menjadi indikator utama pencapaian SPBE.



**Gambar 7 Kegiatan Penyusunan RITIK 2025-2027**



**Gambar 8 Kickoff Meeting Penyusunan RITIK Sekretariat Jenderal DPR RI yang Dihadiri Sekretaris Jenderal DPR RI**

## **6. Perencanaan Manajemen Layanan Teknologi Informasi (MLTI) dan Persiapan Audit ISO/IEC 20000-1:2018**

Kegiatan Perencanaan Manajemen Layanan TI oleh Pusat Teknologi Informasi DPR RI, yang bertujuan untuk memperoleh sertifikasi ISO/IEC 20000-1:2018, secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pelaksanaan SPBE. Standar internasional ini memastikan penerapan praktik terbaik dalam manajemen layanan TI, meliputi perencanaan, desain, transisi, pengiriman, dan peningkatan layanan yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis dan pengguna. Dengan penerapan ISO/IEC 20000-1:2018, Pusat Teknologi Informasi tidak hanya meningkatkan mutu layanan TI, tetapi juga memperkuat tata kelola layanan, meningkatkan kepuasan pengguna, dan menjamin keberlangsungan layanan TI yang berkualitas. Hal ini menjadi bukti komitmen Pusat Teknologi Informasi dalam mendukung pengelolaan TIK berbasis SPBE yang efektif, efisien, dan sesuai standar global.



2024

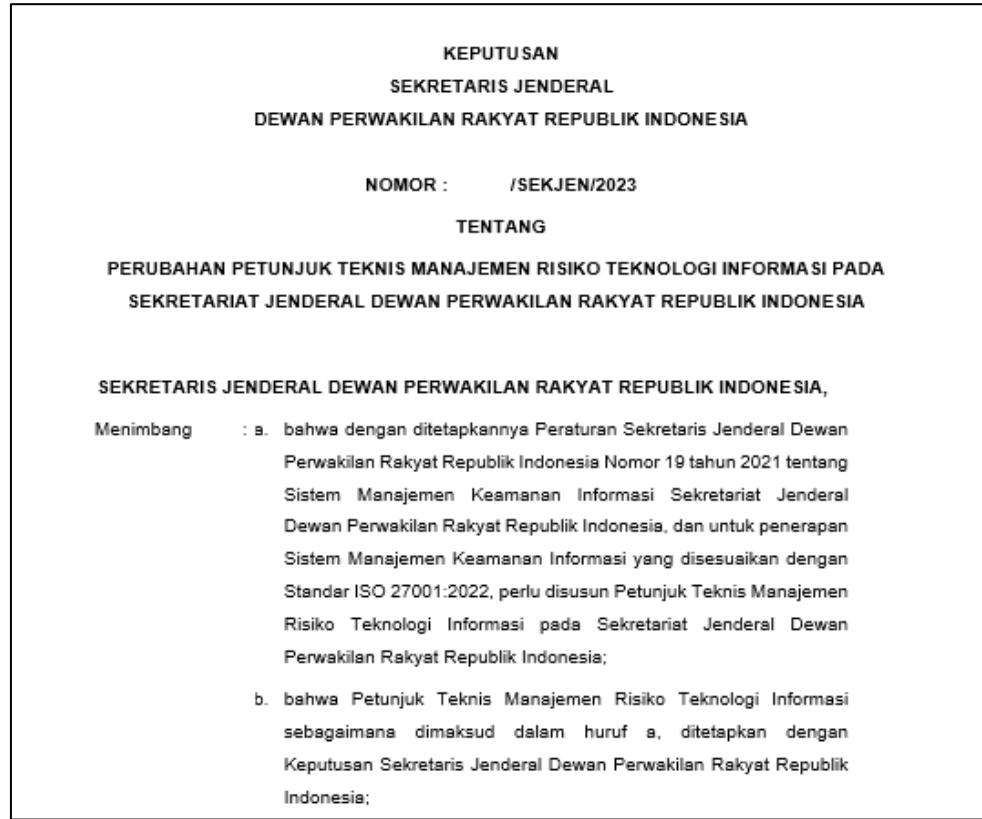


**Gambar 9 Kegiatan Perencanaan MLTI dan Persiapan Audit ISO/IEC 20000-1:2018**

## 7. Meningkatkan Penerapan Manajemen Risiko TIK

Penyempurnaan manajemen risiko TI melalui serangkaian rapat koordinasi dan evaluasi bersama konsultan pada 2024 menjadi langkah strategis yang mendukung pencapaian Indeks Pelaksanaan SPBE. Upaya ini mencakup penyesuaian *risk register* dengan format dan panduan PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2020, yang mencakup siklus Proses Manajemen Risiko, 16 Kategori Risiko, 7 Area Dampak, dan 5 Kertas Kerja Generik. Penyalarasan ini diiringi dengan evaluasi Petunjuk Teknis Manajemen Risiko TI berdasarkan SK Sekjen DPR RI Nomor 1047 Tahun 2023, serta penyusunan draft perubahan SK untuk memastikan kerangka kerja risiko yang relevan dan efektif. Langkah ini tidak hanya meningkatkan tata kelola risiko, tetapi juga memperkuat kesiapan TI dalam mendukung SPBE yang andal, terukur, dan sesuai standar regulasi nasional.





**Gambar 10 Draft Perubahan SK 1047/2023 tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko TI**

## **8. Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penghitungan ABK Jabatan Fungsional Statistisi**

Penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI secara signifikan mendukung pencapaian Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menguatkan tata kelola data berbasis standar nasional. Upaya penyelarasan data dengan Standar Data Statistik Nasional (SDSN) dan penerapan Data Induk/Kode Referensi, seperti Kode Wilayah, memastikan bahwa data yang digunakan memiliki konsistensi, akurasi, dan interoperabilitas. Dokumentasi tahapan pengelolaan data serta penyusunan 4 SOP teknis berdasarkan PERSEKJEN No. 20 Tahun 2022 tentang Satu Data DPR RI memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data. Selain itu, pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan data statistik sektoral bagi unit kerja walidata dan produsen data

memastikan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

**Tabel 16 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain DPR RI**

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	3,00
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,08
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,32
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,94
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,45
<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	<b>100%</b>	<b>2,60</b>	<b>2,35</b>	<b>2,57</b>

Capaian Indeks Statistik Sektoral DPR RI tahun 2024 menunjukkan hasil penilaian sebesar 2,57, melampaui rata-rata nilai nasional yang berada di angka 2,35. Peningkatan ini didukung oleh performa kuat pada Domain Prinsip SDI dengan nilai 3,00, mencerminkan konsistensi dan penerapan standar data yang baik. Namun, terdapat peluang peningkatan pada Domain Kualitas Data (2,08) dan Domain Proses Bisnis Statistik (2,32), yang masih berada di bawah rata-rata nilai nasional. Hasil ini menegaskan pentingnya fokus pada perbaikan kualitas data dan proses bisnis untuk mendukung tata kelola data yang lebih efisien dan akurat.

Langkah strategis lainnya, seperti pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS yang telah menghasilkan surat rekomendasi, mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi nasional terkait statistik sektoral. Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi berdasarkan evaluasi beban kerja dan persetujuan dari Kementerian PANRB menjadi landasan untuk memperkuat SDM di bidang statistik. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan statistik sektoral di DPR RI telah menciptakan ekosistem data yang terintegrasi, akuntabel, dan selaras dengan visi SPBE untuk mendorong transparansi dan efisiensi tata kelola pemerintahan berbasis data.



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/4707/M.SM.01.00/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi  
di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI

30 September 2024

Yth. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI  
di  
Tempat

Merujuk surat Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI nomor: B/10131/OT.04.03/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang intinya menyampaikan usulan kebutuhan jabatan Fungsional Statistisi lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan surat Menteri PANRB nomor B/3/M.SM.02.01/2024 tanggal 24 Januari 2024 perihal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya menyetujui kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) Statistisi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Persetujuan Kebutuhan JF
1.	Statistisi Ahli Madya	1
2.	Statistisi Ahli Muda	4
3.	Statistisi Ahli Pertama	8
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

2. Pengangkatan dalam JF dapat dilaksanakan apabila terdapat lowongan kebutuhan sepanjang tidak melebihi jumlah persetujuan kebutuhan sebagaimana pada angka 1 (satu).
3. Adapun lowongan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) merupakan selisih antara kebutuhan JF dengan bezetting/eksisting pegawai JF tersebut.
4. Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dapat dilaksanakan melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi serta harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Gambar 11 Surat Persetujuan Kebutuhan JF Statistisi dari Kementerian PANRB**

## 9. Penyusunan Arsitektur SPBE As-Is, Arsitektur SPBE To-Be, dan Peta Rencana Pada Aplikasi SIA SPBE V2

Kegiatan evaluasi dan penyusunan arsitektur SPBE yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI secara langsung mendukung pencapaian Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memastikan keselarasan kebijakan internal terhadap Arsitektur SPBE Nasional. Penyusunan dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) 2025-2027 menjadi landasan strategis dalam mengarahkan pengembangan teknologi informasi yang terintegrasi dan sesuai standar nasional. Pemutakhiran data Arsitektur SPBE As-Is melalui aplikasi SIA SPBE V2 memberikan gambaran yang akurat

mengenai kondisi eksisting, yang menjadi dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis data.

Penyusunan Arsitektur SPBE To-Be dan *gap analysis* yang menghasilkan Peta Rencana SPBE mencerminkan pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dan visi SPBE yang diinginkan. Penambahan domain proses bisnis dan aplikasi pada arsitektur SPBE To-Be memastikan pengelolaan yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Hasil *gap analysis* memberikan rekomendasi strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut, yang dijadikan dasar dalam perencanaan jangka panjang. Dengan langkah-langkah ini, Setjen DPR RI menunjukkan komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang inovatif, efisien, dan sesuai dengan visi SPBE, sehingga mendukung tercapainya indikator kinerja SPBE secara keseluruhan.

## 10. Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi

Penyusunan kebijakan tata kelola teknologi informasi oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, dalam bentuk Keputusan Sekjen, Instruksi Sekjen, dan SOP, secara signifikan mendukung pencapaian Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menciptakan kerangka kerja yang sistematis dan terstandar. Penetapan SK, seperti pembentukan Tim Pengelola Satu Data, CSIRT, dan Tim Koordinasi SPBE, memperkuat koordinasi, pengelolaan data, serta respons keamanan siber. Instruksi Sekjen mengenai kebijakan audit, pengelolaan pusat data, aplikasi, dan jaringan memastikan tata kelola teknologi informasi yang terintegrasi dan sesuai dengan prinsip transparansi dan efisiensi. Penyusunan daftar SOP, termasuk SOP Satu Data DPR dan pengelolaan jaringan intra pemerintah, memberikan panduan teknis yang mendukung implementasi kebijakan secara konsisten.

**Tabel 17 Daftar SK dan Instruksi yang Telah Disusun Tahun 2024**

Jenis Produk Hukum	Nomor	Tentang	Tanggal Penetapan/Tahun
SK	355	Tim Pengelola Satu Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024	1 Februari 2024
SK	358	Pembentukan Tim Pengelolaan Command Center Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024	1 Februari 2024
SK	359	Pembentukan Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024	1 Februari 2024
SK	371	Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024	2 Februari 2024
SK	394	Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia	7 Februari 2024
Instruksi	3	Penerapan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	21 Mei 2024
Instruksi	4	Penerapan Kebijakan Pedoman Pengelolaan Pusat Data Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	3 Agustus 2024
Instruksi	5	Penerapan Kebijakan Pedoman Pengelolaan Aplikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	3 Agustus 2024
Instruksi	6	Penerapan Kebijakan Pedoman Pengelolaan Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	3 Agustus 2024

**Tabel 18 Daftar SOP yang Telah Disusun Tahun 2024**

No	SOP	No. SOP AP	Tanggal Penetapan
1	SOP Perencanaan Satu Data DPR	OT.03.03-0286	3 Juni 2024
2	SOP Penjaminan Kualitas Satu Data DPR	OT.03.03-0287	3 Juni 2024
3	SOP Pengumpulan, Analisis, Pengelolaan dan Disemenasi Satu Data DPR	OT.03.03-0288	3 Juni 2024
4	SOP Pemeriksaan dan Penyebarluasan Satu Data DPR	OT.03.03-0289	3 Juni 2024
5	SOP Pengelolaan Jaringan Intra Pemerintah	OT.03.03-0290	3 Juni 2024
6	SOP Permintaan Layanan Server Aplikasi	OT.03.03-0291	3 Juni 2024
7	SOP Permintaan Pembuatan Akun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	OT.03.03-0292	3 Juni 2024
8	SOP Manajemen Kapasitas Teknologi Informasi	OT.03.03-0293	3 Juni 2024
9	SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi	OT.03.03-0294	3 Juni 2024

### **3.2. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Persentase Dukungan Teknologi Informasi)**

Berikut merupakan uraian capaian dan perbandingan pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja **“Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”**.

#### **3.2.1. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja**

**Tabel 19 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Indikator Kinerja : Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia				
Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori
91%	91%	96,25%	105,8%	Sangat Tinggi

Pemenuhan terhadap indikator kinerja Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan melalui ketersediaan aplikasi dan sistem informasi yang dimanfaatkan dan digunakan oleh Anggota DPR RI dengan didukung juga pengembangan dan penambahan jaringan internet untuk Anggota DPR RI di seluruh wilayah DPR RI, pengembangan infrastruktur jaringan internet, dan pengembangan teknologi keamanan informasi. Indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah terlaksana dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 96,25% sehingga pencapaiannya adalah 105,8% (sangat tinggi).

### **3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

**Tabel 20 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Dukungan Teknologi Informasi yang Dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Tahun ke Tahun**

Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
85%	100%	117%	90%	87%	97%	91%	96,25%	105,8%

Perbandingan capaian dari indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan hasil tercapainya target dengan baik. Namun di tahun 2023, realisasi mengalami penurunan yaitu 87% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pada Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2023 ini telah dilakukan penyesuaian definisi dengan kamus indikator Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 Revisi ke-2 (Perubahan Struktur Organisasi). Bahwa penjelasan dari indikator kinerja Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI dilakukan dengan menghitung jumlah aplikasi yang dimanfaatkan dan digunakan oleh Anggota DPR RI dibandingkan dengan seluruh aplikasi yang ada di Setjen DPR RI. Sedangkan pada tahun sebelumnya, perhitungan dari capaian indikator

kinerja Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dihitung dari ketersediaan layanan teknologi informasi yang meliputi jaringan internet, aplikasi sistem informasi, dan keamanan sistem informasi yang diterapkan menyeluruh di lingkungan DPR RI yang dapat dimanfaatkan oleh Anggota DPR RI.

Indikator ini selaras dengan definisi pada kamus indikator, namun tidak semata menghitung jumlah aplikasi yang dimanfaatkan dan digunakan oleh Anggota DPR RI dibandingkan dengan seluruh aplikasi yang ada di Setjen DPR RI melainkan menggunakan prinsip konvergensi, dimana sebuah aplikasi sistem informasi tidak akan dapat diakses, dimanfaatkan atau digunakan oleh Anggota DPR RI jika tanpa didukung oleh ketersediaan jaringan internet untuk Anggota DPR RI, serta penerapan teknologi keamanan informasi yang melindungi data Anggota DPR RI.

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 96,25% dengan penghitungan capaiannya berdasarkan sub komponen yang terdapat pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2024, yakni meliputi:

- a. Pelaksanaan Layanan Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi;
- b. Operasional dan Pemeliharaan Data dan Teknologi Informasi;
- c. Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi;
- d. Pengadaan Infrastruktur Jaringan;
- e. Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan;
- f. Jumlah aplikasi yang digunakan Anggota DPR RI, dan
- g. Aktivasi akun email Anggota DPR RI periode 2024-2029.

Adapun faktor yang menjadi pendorong realisasi kinerja pada indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2024 yaitu dengan terus meningkatkan layanan teknologi informasi melalui berbagai pengadaan dan pengelolaan infrastruktur. Salah satu upaya utama adalah peningkatan bandwidth jaringan internet menjadi 3,98 Gbps jalur internasional dan 5,89 Gbps jalur domestik yang didistribusikan melalui beberapa ISP dengan zonasi

berbasis lokasi untuk meningkatkan kualitas serta kecepatan akses internet, guna menunjang kelancaran kegiatan rapat maupun persidangan secara virtual. Selain itu, dilakukan pengadaan Fire Suppression System untuk Ruang Network di Wisma Griya Sabha Kopo dan Ruang Server, guna meningkatkan keamanan terhadap potensi risiko kebakaran. Dilakukan pula pengadaan Distribution Switch, Switch Access, serta Wireless Access Point dan Peralatan Pendukung Wireless Access Point Outdoor untuk memperluas dan memperkuat akses jaringan nirkabel di lingkungan DPR RI. Untuk mendukung keberlanjutan operasional teknologi informasi, diadakan pula Power System dan Baterai UPS untuk Ruang Network dan Server, serta pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Peralatan Keamanan Ruang Network dan Ruang Kerja. Dalam rangka meningkatkan kualitas akses internet, telah dilakukan pengadaan Kabel Konektor Fiber Optik dan Peralatan Penunjang Kabel LAN, serta pelaksanaan penarikan dan perapihan jaringan internet. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan akses internet yang aman melalui pengelolaan trafik antara jaringan internal DPR RI dengan jaringan internet. Adapun aplikasi yang diperuntukan kepada Anggota DPR RI meliputi Bale Aspirasi, Cloud, Email, Simfoni, SIDILAN, SIPERDANA, SIGOTA, SITANANG, PERJADIN, SIGAD.

### **3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Pada Renstra**

**Tabel 21 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	96,25%	91%	105,8%

Dari tabel di atas realisasi indikator kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” pada tahun 2024 sebesar 96,25%. Realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 memiliki capaian akhir Renstra sebesar 105,8%. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kebutuhan terhadap dukungan teknologi informasi yang semakin meningkat, diantaranya peningkatan terhadap pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi baik untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan maupun kesetjenan, kebutuhan peningkatan kapasitas bandwidth untuk pelaksanaan rapat/persidangan virtual, peningkatan ketersediaan akses jaringan internet di lingkungan DPR RI, kebutuhan kapasitas penyimpanan (*storage*) server, peningkatan keamanan informasi untuk mencegah terjadinya insiden siber, serta peningkatan pada peralatan jaringan internet.

### **3.2.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” pada Pusat Teknologi Informasi dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

### **3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

***Tabel 22 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis***

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan	91%	96,25%	105,8%	Faktor pendukung realisasi kinerja, yaitu: a. Pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem	a. Melakukan pemeliharaan dan pengujian layanan jaringan internet dan perangkatnya untuk menjaga

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
		Perwakilan Rakyat Republik Indonesia				<p>informasi di lingkungan DPR RI;</p> <p>b. Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan penambahan infrastruktur jaringan internet;</p> <p>c. Terlaksananya kegiatan pengembangan teknologi keamanan informasi.</p> <p>Tantangan yang dihadapi:</p> <p>a. Meningkatkan <i>engagement</i> penggunaan aplikasi oleh Anggota DPR RI</p>	<p>kualitas layanan teknologi informasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;</p> <p>b. Melakukan pengembangan dan penambahan infrastruktur jaringan internet;</p> <p>c. Melakukan dokumentasi dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis aktivasi akun email kepada Anggota DPR RI pada pelantikan Anggota DPR RI Periode 2024-2029.</p>

Realisasi pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” adalah sebesar 96,25% sehingga mencapai target yang ditetapkan senilai 91%. Berdasarkan sub komponennya yang terdapat pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2024, maka detil keseluruhan dari capaiannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 23 Capaian Rencana Aksi Indikator Kinerja Persentase Dukungan Teknologi Informasi yang Dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi		
Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Realisasi
1. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	a. Pelaksanaan Layanan Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi	100%
	b. Operasional dan Pemeliharaan Data dan Teknologi Informasi	100%
	c. Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi	100%
	d. Pengadaan Infrastruktur Jaringan	100%
	e. Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan	100%
	f. Jumlah Aplikasi yang Digunakan Anggota DPR RI	100%
	g. Aktivasi Akun Email Anggota DPR RI Periode 2024-2029	73,75%
<b>Rata-Rata Capaian Keseluruhan</b>		<b>96,25%</b>

Pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi Tahun 2024, beberapa subkomponen telah mencapai realisasi 100%. Capaian tersebut meliputi: Pelaksanaan Layanan Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi, Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi, Pengadaan Infrastruktur Jaringan, Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan, serta jumlah aplikasi yang digunakan oleh Anggota DPR RI. Namun, capaian untuk Aktivasi Akun Email Anggota DPR RI Periode 2024-2029 masih berada pada 73,75%. Persentase ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Anggota DPR RI yang telah melakukan aktivasi dan total seluruh Anggota DPR RI, yaitu 579 orang. Dari jumlah tersebut, yang sudah melakukan aktivasi adalah 307 orang anggota lama yang terpilih kembali dan 120 orang anggota baru.

### 3.2.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 24 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian (CI)	Pagu Anggaran (PA)	Realisasi Anggaran (RA)	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	91%	96,25%	105,8%	60.278.515.000	60.186.019.883	99,85%

$$\text{Efisiensi Anggaran} = \frac{((PA \times CI) - RA)}{(PA \times CI)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Anggaran} = \frac{((60.278.515.000 \times 105,8\%) - 60.186.019.883)}{(60.278.515.000 \times 105,8\%)} \times 100\% = 5,6\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi di atas, indikator kinerja Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki tingkat efisiensi sebesar 5,6% masih di dalam range batas maksimal sebesar 20% dan batas minimal sebesar -20%. Tingkat efisiensi tersebut menandakan penggunaan sumber daya yang digunakan telah efisien.

Namun demikian, PMK No. 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK No. 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK No. 62/2023, yaitu sebagai berikut:

$$E = (\text{Cost per Unit Realisasi} / \text{Cost per Unit Target}) \times 100\%$$

$$= ((\text{realisasi anggaran}/\text{realisasi output}) / (\text{pagu anggaran}/\text{target output})) \times 100\%$$

$$= ((60.186.019.883/96,25) / (60.278.515.000/91)) \times 100\%$$

$$= (625.309.297 / 662.401.264) \times 100\%$$

$$= 94\%$$

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi” dengan indikator kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Indikator kinerja, sudah terealisasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 105,8% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 99,85% dengan menggunakan alokasi anggarannya untuk pelaksanaan Pengadaan License dan Support IP Locater, Konsultan Perencanaan Pengembangan Ruang Server, Pengadaan Switch Access, Pengadaan Wireless Access Point, Pengadaan Core Switch, Pengadaan Virewall VPN Concentrator, Pengadaan Samsung Flitz (Mondopad), Pengadaan Access Point Wisma Griya Sabha Kopo, Pengadaan Distributions Switch, Pengadaan Perangkat Pengolah Data anggaran dan keuangan, Pengadaan Alat Penyimpanan Data TVR, Pengadaan Laptop untuk Perisalah, Pengadaan Wireless Access Point Kompleks Parlemen, Pengadaan SFP Connector Fiber Optic, Pengadaan SFP Connector Fiber Optic, Pengadaan Peralatan Pendukung Simfoni, Pengadaan Pusat Operasi Keamanan, Jasa Perancangan Jaringan FO, UTP dan Kelistrikan Perangkat Jaringan di Komplek MPR/DPR/DPD RI, Jasa Integrator System Portal Satu Data DPR RI, Jasa Migrasi Hybrid Collaboration Single Sign On System, Perbaikan Instalasi Alat Pemadam Kebakaran, Pemeliharaan Switch Access Gedung Dewan, Pemeliharaan Switch Access Gedung Setjen, Pemeliharaan Wireless Access Point, Pemeliharaan AC Ruang Server, Pemeliharaan UPS Ruang Server, Pemeliharaan Peralatan Pemadam Kebakaran Ruang Server, Pemeliharaan Server Telkom sigma DPR RI, Pemeliharaan Server Gedung DPR RI, Pemeliharaan Server Colocation Taman Tekno, Pemeliharaan Peralatan Command Center, Pengadaan Peralatan AC, Pengadaan Baterai UPS Ruang Server, Pengadaan dan Pengujian FM200, Pengadaan Peralatan Pendukung Komputer, Pengadaan Peralatan Pranata Komputer dan Peralatan Monitoring, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Nusantara I, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Wisma Kopo, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Gedung Setjen DPR RI, Penarikan dan Perapihan Jaringan Internet Komplek Parlemen, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel

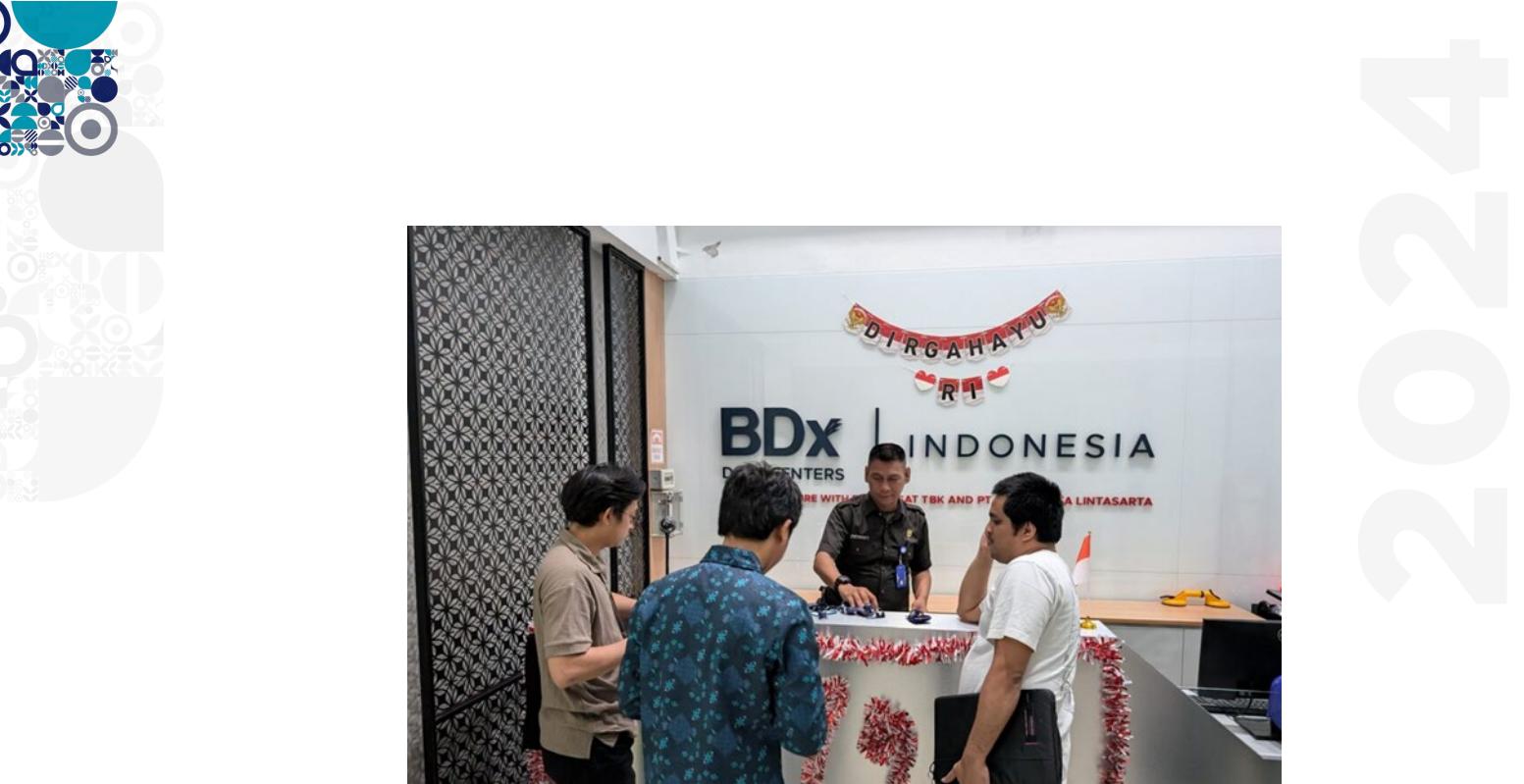
UTP Gedung Nusantara, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Ruang Kerja, Pengadaan Lisensi Zoom Webinar dan Paripurna, Pengadaan License Analis Kebijakan Parlemen, Pengadaan License Pengolahan Media Sosial, Pengadaan License Pengolahan Data Legislasi, Pengadaan License Kearsipan, Pengadaan License Pengolahan Data TV Parlemen, Pengadaan Renewal Support Link Controller, Pengadaan Renewal Support Core Switch dan Smartzone, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Firewall di Gedung DPR RI, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Web Application Firewall, Pengadaan Renewal Support and Subscription Security Colocation di Telkomsigma, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Firewall Colocation Taman Tekno, Pengadaan Renewal Support Wireless Access Point, Pengadaan License dan Support Ruckus Smartcell Insight, Pengadaan License Antivirus, Pengadaan License Software Office, Pengadaan License Software Sistem Operasi, Pengadaan License Software Perkantoran, Pengadaan Renewal Support dan Subscription Web Application Firewall Januari 2023, Renewal Software Backup, Pengadaan Licensi Tableau Server dan Tenable Nessus, Pengadaan Pengukuran Tingkat Kematangan Teknologi Informasi Setjen DPR RI, Pengadaan Aplikasi "Notulite Pro" Bagian Risalah, Pengembangan Website SDMA, Pengelola Proses Bisnis Data Analitik, Pengembangan Peralatan Command Center, Pengadaan Peralatan Virtual Meeting Command Center, Pengadaan Media Collaborator Command Center, Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pengelola Website Setjen, Sewa Ruang Penyimpanan Data Parlemen, Sewa Ruang Penyimpanan Dokumen Terpadu, Langganan Jasa Internet Dewan, Langganan Jasa Internet Setjen, Langganan Jasa Internet Colocation Telkomsigma, Langganan VPN IP Pusat Data Nasional, Langganan Jasa Internet Colocation Taman Tekno, Langganan WA Gateway Dewan, Langganan WA Gateway Setjen, Langganan SMS Gateway Dewan, Langganan WA Gateway, Langganan License VPN dan SSL, Langganan Jasa Internet Link Dukcapil, Pengadaan Perlengkapan Komputer Jaringan, Jasa Konsultan Perorangan Business Analyst, Jasa Konsultan Perorangan Data Scientist, Jasa Konsultan Perorangan Data Engineer, Jasa Konsultan Perorangan Data Analyst, Jasa Konsultan Perorangan

IT Administrator, Jasa Konsultan Perorangan IT Technical Writer, Jasa Konsultan Perorangan Analytic Business Analyst, Jasa Konsultan Pengelola Model Data Analitik, Jasa Konsultan Pengelola Teknologi Data Analitik, Jasa Konsultan Pengelola Arsitektur Data Analitik, Jasa Konsultan Administrator Infrastruktur Data Analitik, Jasa Redesign Jaringan Access Point Wisma, Pengisian Fire Suppression System, Pengadaan peralatan kabel jaringan, Pengadaan Peralatan Pendukung Jaringan, Pengadaan Kabel UTP, Pengadaan Perlengkapan Patch Cord, Modular, dll, Pengadaan Perangkat Online Streaming, Pembangunan Aplikasi Satu Data DPR RI, Pembangunan Aplikasi Sistem Manajemen Tenaga Pendukung, Pembangunan Sistem Repotori Aset Aplikasi Terintegrasi, Pengembangan Aplikasi Notula, Pengembangan Backend Website Setjen DPR RI, Pengembangan Aplikasi LMS Setjen DPR RI, dan Pengembangan Website AIPA.

### **3.2.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Teknologi Informasi selama tahun 2024 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, yaitu:

- Memastikan ketersediaan dan redudansi serta memaksimalkan kinerja ruang pusat data dengan melakukan Sewa Collocation Data Center Telkomsigma Januari-Maret 2024, Sewa Collocation Data Center Telkomsigma April - September 2024, Sewa Collocation Data Center Taman Tekno, Penambahan Sewa Collocation Data Center Taman Tekno;



**Gambar 12 Penggunaan Ruang Penyimpanan Data Parlemen Pusat Data TelkomSigma**

- Menyediakan layanan internet di lingkungan DPR RI meliputi Langganan Jasa Internet E-KTP, Langganan Jasa Internet Metro Pusat Data Nasional, Langganan Jasa Internet Dewan, Langganan Jasa Internet Setjen, Langganan Jasa Internet Colocation Data Center Telkomsigma, Langganan Jasa Internet Colocation Data Center Taman Tekno, Langganan Jasa Internet Dukcapil;
- Meningkatkan dan mengembangkan layanan jaringan baik internal DPR RI maupun jaringan internet dengan melakukan Pengadaan Power System Ruang Panel Wisma Griya Sabha Kopo, Pengadaan Fire Supression System Ruang Network Wisma Griya Sabha Kopo, Pengadaan Distribution Switch, Pengadaan Switch Access, Pengadaan Wireless Access Point, Pengadaan Peralatan Presensi Persidangan, Pengadaan Peralatan Pendukung Wireless Access Point Outdoor, Perapihan Panel Listrik Ruang Server DPR RI, Pengadaan Kabel UTP, Penambahan Kuota Subscription Web Application Firewall, Peralatan Komputer Jaringan, Pengadaan Peralatan Komputer Jaringan, Pengadaan Peralatan Kabel Jaringan, Pengadaan Peralatan Pendukung Jaringan, Pengadaan Fire Suppression System Ruang Server, Pengadaan Power System Ruang Network Wisma Griya Sabha Kopo,

Pengembangan Media Penyimpanan Digital Video Streaming DPR RI, Pengadaan Rak Panel Wisma Griya Sabha Kopo, Pengadaan Baterai UPS Ruang Server, Pengadaan Konektor Fiber Optic Jaringan , Penggantian Peralatan Server Aplikasi, Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi, Pengadaan Peralatan Keamanan Ruang Network dan Ruang Kerja, Pembuatan Instalasi Fire Supresion Ruang Network Wisma Griya Sabha Kopo, Pengembangan File Supresion System Ruang Server, Pengadaan Peralatan Persidangan Rapat Online dan Peralatan Monitoring, Pengadaan Peralatan Machine Learning, Pengadaan Access Control Ruang Command Center, Perapihan Ruang Network Wisma Griya Sabha Kopo, Pengembangan Technical Control Room Ruang Command Center, Pengadaan Layanan Conversational Artificial Intelligence Service, Pengembangan Audio Ruang Command Center, Pengadaan Sistem Proteksi Secure Service Edge, Pengadaan Kabel Konektor Fiber Optik, Pengadaan Peralatan Penunjang Kabel LAN, Relokasi dan Migrasi Storage, Relokasi dan Migrasi Sistem Perangkat Network , Manage Service Pusat Operasi Keamanan, Jasa Perapihan Smart Rack AC dan Panel Listrik Wisma Griya Sabha Kopo , Jasa Pembuatan Grounding Panel Wisma Griya Sabha Kopo;

- Melakukan pengembangan jaringan dengan melakukan Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Gedung Nusantara I, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Gedung Nusantara IV, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel KORPRI, PAM OBIT, Jantung Sehat, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Gedung Nusantara, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Pengelola Rumah Jabatan, Rumah Dinas dan Unit Kerja, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Wisma Griya Sabha Kopo, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Fasilitas Umum;
- Melakukan pemeliharaan infrastruktur secara rutin meliputi Pemeliharaan Switch Access Gedung Dewan, Pemeliharaan Switch Access Gedung Setjen, Pemeliharaan Wireless Access Point Gedung Dewan, Pemeliharaan Wireless Access Point Gedung Setjen, Pemeliharaan AC Ruang Server, Pemeliharaan UPS Ruang Server, Pemeliharaan Fire

Suppression System Ruang Server, Pemeliharaan Server Gedung DPR RI, Pemeliharaan Server Colocation Telkomsigma, Pemeliharaan Server Colocation Taman Tekno, Pemeliharaan Peralatan Command Center;



**Gambar 13 Pemeliharaan Rutin Jaringan**

- Memastikan perangkat yang digunakan selalu mendapat pembaharuan dan dukungan dengan melakukan Langganan Renewal Support Link Controller, Langganan Renewal Support Core Switch dan Smartzone, Langganan Renewal Support dan Subscription Firewall di Gedung DPR RI, Langganan Renewal Support dan Subscription Web Application Firewall, Langganan Renewal Support Wireless Access Point, Langganan Renewal Support Perangkat DNS, DHCP, dan IP Address Management (DDI), Pengadaan Renewal Software Backup;
- Memastikan penggunaan perangkat lunak dengan fitur penuh dengan pengadaan lisensi meliputi Langganan Licence dan Software, Langganan Lisensi Zoom, Webinar dan Paripurna, Langganan License Analis Kebijakan Parlemen, Langganan License Pengolahan Media Sosial, Langganan License Pengolahan Data Legislasi, Langganan License Kearsipan, Langganan License Pengolahan Data TV Parlemen, Langganan License dan Support Ruckus Smartcell Insight, Langganan License Collaboration Office 365, Langganan License Hybrid

Collaboration Single Sign On System, Langganan License DNS Guardian, Langganan Lisence Pusbangkom, Langganan Lisence Adobe Pro, Langganan License Nessus, Langganan License ECLIS, Pengadaan License Server Productivity, Pengadaan Lisensi Visualisasi Data Analitik;

- Memberikan layanan informasi melalui Langganan WA Gateway, Langganan WA Gateway Setjen, Langganan SMS Gateway; dan
- Menggunakan jasa konsultan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta mengembangkan strategi teknologi informasi meliputi Jasa Konsultan Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi DPR RI, Jasa Konsultan Pelaksanaan Audit Surveillance ISO 27001, Jasa Konsultan Perancangan Business Continuity Plan Layanan Teknologi Informasi Parlemen, Jasa Konsultan Perencanaan Manajemen Risiko dan Aset Teknologi Informasi, Jasa Konsultan Perencanaan Manajemen Layanan Teknologi Informasi, Jasa Konsultan Pelaksanaan Audit ISO 20000 Layanan Teknologi Informasi DPR RI, Jasa Konsultan SOP Keamanan Informasi, Jasa Konsultan Penyusunan Arsitektur SPBE As-Is dan To-Be, Jasa Konsultan Perancangan Sistem IoT Pusat Teknologi Informasi, Jasa Konsultan Evaluasi RTIK 2024-2027.

### **3.3. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Persentase Aplikasi yang Terintegrasi)**

Berikut merupakan uraian capaian dan perbandingan pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja “**Persentase aplikasi yang terintegrasi**”.

#### **3.3.1. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja**

**Tabel 25 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Indikator Kinerja : Persentase aplikasi yang terintegrasi				
Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori
96%	96%	97,33%	101,4%	Sangat Tinggi

Persentase aplikasi yang terintegrasi diwujudkan dalam pencapaian akan indikator kinerja jumlah aplikasi/website yang dibangun/dikembangkan di unit-

unit kerja oleh Pusat Teknologi Informasi. Menggunakan relasi matriks dari struktur database dan interoperabilitas data yang digunakan antar aplikasi, telah tercapai 97,33% aplikasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan total aplikasi keseluruhan berjumlah 108 aplikasi. Kegiatan telah terlaksana melebihi target yang ditetapkan sehingga pencapaiannya adalah 101,4%.

### **3.3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

**Tabel 26 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Aplikasi yang Terintegrasi dari Tahun ke Tahun**

Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
90%	95%	105%	95%	96%	101%	96%	97,33	101,4

Dalam tiga tahun terakhir, terdapat tren positif dalam pencapaian indikator kinerja Pusat Teknologi Informasi. Capaian dari tahun ke tahun berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022, dengan target sebesar 90%, realisasi yang dicapai mencapai 95%, menghasilkan capaian sebesar 105%. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang signifikan dalam optimalisasi kinerja unit. Tren positif berlanjut pada tahun 2023, di mana target dinaikkan menjadi 95%. Realisasi yang berhasil dicapai sebesar 96%, dengan capaian sebesar 101%. Kinerja ini menunjukkan bahwa meskipun target yang ditetapkan semakin tinggi, unit kerja tetap mampu melampaui ekspektasi.

Pada tahun 2024, target kembali meningkat menjadi 96%, dengan realisasi yang dicapai sebesar 97,33%, menghasilkan capaian sebesar 101,4%. Peningkatan ini menunjukkan konsistensi dalam keberhasilan pelaksanaan program kerja, sekaligus mencerminkan peningkatan kapasitas dan efektivitas operasional di lingkungan Pusat Teknologi Informasi. Secara keseluruhan, capaian yang melampaui target dalam tiga tahun terakhir menggambarkan keberhasilan strategi yang diterapkan serta peningkatan kualitas tata kelola teknologi informasi, sistem informasi, dan infrastruktur yang semakin optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan setiap tahunnya, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan, memberikan hasil yang positif dan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pencapaian indikator “Persentase aplikasi yang terintegrasi.” Keberhasilan ini mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola dan strategi yang selaras dengan tujuan organisasi.

Adapun faktor-faktor pendorong utama yang berkontribusi terhadap tercapainya target indikator ini meliputi:

### **1. Efisiensi Manajemen Data**

Implementasi pengelompokan aplikasi ke dalam 15 *cluster* telah meningkatkan efisiensi manajemen data. Lebih jauh, keterpaduan ini diperkuat dengan pengembangan SuperApp yang dirancang berdasarkan Peta Jalan Evaluasi RITIK dan Arsitektur Data. Langkah ini berhasil menghubungkan rencana strategis organisasi dengan pengembangan teknologi, menciptakan solusi yang lebih terintegrasi dan efektif.

### **2. Penyederhanaan Proses Bisnis**

Perubahan dan penyederhanaan proses bisnis di beberapa unit kerja menjadi faktor penting dalam mengurangi jumlah aplikasi yang ada. Penyederhanaan ini memastikan aplikasi yang digunakan lebih relevan, terstruktur, dan mendukung efisiensi operasional secara keseluruhan.

### **3. Penerapan Tren SPBE dan Aplikasi Berbagi Pakai**

Kebijakan SPBE yang mendorong penggunaan aplikasi berbagi pakai memberikan dampak langsung pada pengurangan aplikasi sejenis di internal Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal ini mengarah pada integrasi atau penonaktifan aplikasi-aplikasi yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi, sekaligus mendukung efisiensi dan efektivitas teknologi informasi.

Dengan langkah-langkah ini, pencapaian indikator “Persentase aplikasi yang terintegrasi” tidak hanya mencerminkan keberhasilan perencanaan dan

pelaksanaan, tetapi juga menggambarkan kematangan organisasi dalam beradaptasi terhadap kebutuhan strategis dan tren teknologi terkini.

### 3.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Pada Renstra

*Tabel 27 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra*

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase aplikasi yang terintegrasi	97,33%	96%	101,4%

Dari tabel di atas realisasi indikator kinerja “Persentase aplikasi yang terintegrasi” pada tahun 2024 sebesar 97,33%. Capaian akhir Renstra Realisasi indikator kinerja ini jika dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan target periode akhir Renstra tahun 2020-2024 adalah sebesar 101,4%.

### 3.3.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja “Persentase aplikasi yang terintegrasi” pada Pusat Teknologi Informasi dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

### 3.3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

**Tabel 28 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatkan kualitas dukungan data dan informasi	Persentase aplikasi yang terintegrasi	96%	97,33%	101,4%	<p>Faktor pendukung keberhasilan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki RITIK Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 dengan Peta Jalan TIK sebagai acuan dalam pembangunan/peningembangan aplikasi;</li> <li>b. melakukan pengembangan framework dan restrukturisasi database aplikasi;</li> <li>c. kolaborasi dengan aplikasi terintegrasi dan berbagi pakai dari K/L/I lainnya.</li> <li>d. Melakukan klasterisasi aplikasi menjadi 15 klaster</li> <li>e. Melakukan pengukuran utilitas aplikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Pemanfaatan RITIK dan Peta Jalan TIK</b> Sosialisasikan RITIK dan Peta Jalan TIK kepada seluruh tim, evaluasi berkala, dan pastikan pengembangan aplikasi selaras dengan visi strategis Setjen DPR RI untuk mendukung pembangunan aplikasi yang terarah.</li> <li>b. <b>Pengembangan Framework dan Restrukturisasi Database</b> Gunakan framework modern untuk mempercepat pengembangan aplikasi, standarisasi pengelolaan database, dan lakukan migrasi data secara aman guna mendukung interoperabilitas antar aplikasi.</li> <li>c. <b>Kolaborasi dengan K/L/I Lainnya</b> Bangun kemitraan strategis untuk berbagi pakai aplikasi atau data, tingkatkan interoperabilitas</li> </ul>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
							<p>melalui API standar, dan adakan forum komunikasi antar lembaga untuk berbagi praktik terbaik.</p> <p>d. <b>Klasterisasi Aplikasi Menjadi 15 Klaster</b> Kelompokkan aplikasi berdasarkan fungsinya untuk efisiensi pengelolaan, tetapkan penanggung jawab setiap klaster, dan pantau kinerjanya agar lebih terorganisir dan terukur.</p> <p>e. <b>Pengukuran Utilitas Aplikasi</b> Tetapkan indikator kinerja, lakukan survei kepuasan pengguna, dan gunakan dashboard pemantauan real-time untuk mengukur efektivitas aplikasi serta mengidentifikasi peluang peningkatan.</p>

### 3.3.6. Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 29 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian (CI)	Pagu Anggaran (PA)	Realisasi Anggaran (RA)	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase aplikasi yang terintegrasi	96%	97,33%	101,4%	11.225.436.000	11.198.891.220	99,76%

$$\text{Efisiensi Anggaran} = \frac{((\text{PA} \times \text{CI}) - \text{RA})}{(\text{PA} \times \text{CI})} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Anggaran} = \frac{((11.225.436.000 \times 101,4\%) - 11.198.891.220)}{(11.225.436.000 \times 101,4\%)} \times 100\% = 1,6\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi di atas, indikator kinerja Persentase aplikasi yang terintegrasi memiliki tingkat efisiensi sebesar 1,6% masih di dalam range batas maksimal sebesar 20% dan batas minimal sebesar -20%. Tingkat efisiensi tersebut menandakan penggunaan sumber daya yang digunakan telah efisien.

Namun demikian, PMK No. 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK No. 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK No. 62/2023, yaitu sebagai berikut:

$$E = (\text{Cost per Unit Realisasi} / \text{Cost per Unit Target}) \times 100\%$$

$$= ((\text{realisasi anggaran}/\text{realisasi output}) / (\text{pagu anggaran}/\text{target output})) \times 100\%$$

$$= ((11.198.891.220/97,33) / (11.225.436.000/96)) \times 100\%$$

$$= (115.061.042 / 116.931.625) \times 100\%$$

$$= 98\%$$

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Persentase aplikasi yang terintegrasi” telah diselenggarakan dipdengan efisien dan efektif. Sasaran program dengan indikator kinerja tersebut di atas sudah mencapai target dengan capaian sebesar 101,4% dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 99,76%. Alokasi anggaran untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi, redesain website, pengembangan framework, serta restrukturisasi database aplikasi, termasuk belanja modal lainnya, dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi teknologi secara komprehensif. Pengalokasian dana untuk pembangunan aplikasi sistem informasi mencerminkan komitmen investasi dalam inovasi teknologi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus responsivitas terhadap dinamika kebutuhan organisasi. Redesain website menjadi komponen strategis dari transformasi digital, yang menekankan pada pentingnya tampilan dan fungsionalitas modern untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Pengembangan framework diberikan perhatian khusus untuk memastikan adanya fondasi teknologi yang kokoh, fleksibel, dan dapat discale sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Selain itu, restrukturisasi database aplikasi diarahkan pada optimalisasi pengelolaan data, memastikan integrasi yang lebih baik, serta peningkatan kecepatan akses informasi yang mendukung pengambilan keputusan secara tepat waktu dan akurat. Upaya ini mencerminkan pendekatan strategis dalam pemanfaatan teknologi untuk memperkuat kapasitas organisasi menghadapi tantangan dan peluang di era digital.

### **3.3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Pusat Teknologi Informasi selama tahun 2024 dalam hal untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase aplikasi yang terintegrasi”, yaitu :

1. melakukan transisi framework aplikasi dari Zend Framework ke Laravel.  
Keputusan ini diambil untuk meningkatkan adaptabilitas terhadap

perubahan teknologi yang terus berkembang, memastikan kelenturan dalam pengembangan, dan mendukung integrasi aplikasi dengan lebih efektif;

2. melalui pengelompokan aplikasi menjadi 15 cluster, pembangunan SuperApp, dan restrukturisasi database aplikasi, Pusat Teknologi Informasi telah menciptakan dasar yang kokoh untuk integrasi aplikasi. Langkah ini memungkinkan identifikasi peluang integrasi yang lebih baik dan memberikan landasan yang solid untuk pengembangan aplikasi yang lebih terpadu;
3. sebanyak 26 aplikasi sistem informasi telah berhasil dikembangkan, mencakup 17 aplikasi yang merupakan pengembangan dari aplikasi yang sudah ada, dan 9 aplikasi baru yang diusulkan;
4. melakukan restrukturisasi database dalam upaya pengoptimisasian proses manajemen data yang efisien. Fokus diberikan pada keterpaduan dan kecepatan akses data guna mendukung integrasi aplikasi menjadi lebih baik.

**Tabel 30 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Selama Tahun 2024**

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Unit Kerja Pengusul	Pengembangan	Pembangunan Baru
1	IPPP 2024	Website IPPP 2024 dikembangkan sebagai platform digital resmi untuk mendukung penyelenggaraan dan kolaborasi dalam program <b>Indonesia - Pacific Parliamentary Partnership</b> . Website ini dirancang untuk memberikan akses informasi yang komprehensif dan terkini mengenai agenda, kegiatan, serta hasil kerja sama antara parlemen Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasifik.	Badan Kerjasama Antar Perlemen		V
2	TSP (Admin, front end)	Aplikasi Manajemen Tenaga Sistem Pendukung dibuat untuk mengelola.	Biro SDMA	V	

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Unit Kerja Pengusul	Pengembangan	Pembangunan Baru
		<p>Adapun perubahan yang dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generate format NIT (Nomor Induk TSP)</li> <li>• Format SPK</li> <li>• Target Kinerja</li> <li>• Penyesuaian remunerasi TSP</li> <li>• </li> </ul>			
3	AKILA	Website Learning Management System (LMS) yang dinaman AKILA (ayo kita belajar legislatif) adalah platform daring yang dirancang untuk mengelola dan menyampaikan berbagai kegiatan pembelajaran secara digital. LMS menyediakan ruang virtual di mana pengajar dapat membuat, menyusun, dan menyampaikan konten pendidikan, serta memonitor dan mengevaluasi kemajuan peserta didik.	PUSBANGKOM	V	
4	Cuti Online	Aplikasi Cuti online adalah modul yang dibuat untuk memfasilitasi pegawai dalam hal mengajukan cuti.	BIRO SDMA	V	
5	Website Perpustakaan	Website perpustakaan adalah suatu platform daring yang menyediakan akses elektronik ke berbagai layanan perpustakaan, termasuk katalog online, peminjaman buku secara digital, informasi tentang koleksi, jadwal acara, dan sumber daya elektronik lainnya.	Biro Humas dan Protokol		V
6	Admin Website Setjen DPR RI	<p>Website Setjen DPR RI adalah website yang berisi tentang informasi-informasi terkait kesetjenan. Berisi berita, agenda, kegiatan, dan layanan lainnya.</p> <p>Pengembangan yang dilakukan adalah membuat CMS untuk website Setjen DPR</p>	Pustekinfo		V
7	Website DPR RI	Website DPR RI adalah platform daring resmi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik	Pustekinfo	V	

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Unit Kerja Pengusul	Pengembangan	Pembangunan Baru
		Indonesia. Situs ini menyediakan informasi terkini tentang aktivitas, kebijakan, legislasi, anggota parlemen, dan berbagai hal terkait tugas dan fungsi DPR RI.			
8	STELA	<p>Aplikasi STELA adalah Aplikasi Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan yang digunakan untuk mengelola permintaan layanan teknologi informasi yang ditujukan ke Pusat Teknologi Informasi, dengan tiga fungsi utama yaitu sistem tiket digital, eskalasi layanan, dan sistem <i>rating</i>.</p> <p>Pengembangan aplikasi STELA dilakukan untuk mendukung kebutuhan MLTI dan standar ISO 20000-1 dengan perubahan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan notifikasi real-time.</li> <li>2. Penghapusan step klasifikasi, tombol <i>on hold</i>, dan tombol solusi operator.</li> <li>3. Penyesuaian form dengan kolom mandatory.</li> <li>4. Penambahan jam pada <i>timestamp</i>.</li> <li>5. Penambahan fitur log STELA untuk mencatat langkah kerja (<i>step-by-step</i>).</li> </ol> <p>Perubahan ini bertujuan menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi standar layanan teknologi informasi.</p>	Pustekinfo	V	
9	SIMATA	Aplikasi SIMATA adalah Sistem Informasi Manajemen Talenta yang digunakan untuk mengetahui pegawai yang sudah divisualisasi dengan dipetakan sesuai dengan potensi dan kinerja agar menjadi acuan keputusan untuk pengaturan	Bagian Perencanaan dan Pola Karier ASN		V

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Unit Kerja Pengusul	Pengembangan	Pembangunan Baru
		<p>dalam kepegawaian.</p> <p>Pengembangan aplikasi SIMATA dilakukan untuk mendukung fungsionalitas baru dan memperbaiki bugs yang ada dengan perubahan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan minor bugs dari tahun 2023.</li> <li>2. Penambahan modul CRUD untuk pengelolaan bobot.</li> <li>3. Eksperimen pengaturan bobot oleh Pak Dono.</li> <li>4. Eksperimen interval dinamis versus statis.</li> <li>5. Pengembangan antarmuka (UI) modul CRUD interval. Perubahan ini dirancang untuk meningkatkan akurasi dan fleksibilitas analisis data.</li> </ol>			
10	Perjadin (Modul Merpati =>Kunker Perorangan Anggota, Update modul SIPAMAN, SILOPER, ABIDIN)	<p>Perjadin adalah sistem informasi perjalanan dinas yang berisi data dokumentasi perjalanan dinas pegawai dan anggota. SILOPER (perjadin.dpr.go.id) adalah sebuah sistem informasi loket perjalanan. Sistem aplikasi ini dibentuk dengan tujuan sebagai dokumentasi dari laporan sistem informasi loket perjalanan yang dimuat dan dikelola.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat penambahan modul Merpati (Kunjungan perorangan</li> <li>• Membuat modul aplikasi pemulangan dan pemindahan anggota dewan</li> </ul>	Bagian Perjalanan	V	
11	SAKIP	Website SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) Setjen DPR adalah platform daring yang dikelola oleh Setjen DPR untuk menyajikan informasi terkait	Bagian PKORB	V	

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Unit Kerja Pengusul	Pengembangan	Pembangunan Baru
		akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Setjen DPR RI			
12	SINONA	Adalah aplikasi yang berisi Proses lamaran dan update data secara online bagi para Pegawai Kontrak di lingkungan Setjen DPR RI. Pegawai Kontrak akan melengkapi administrasi menggunakan aplikasi SINONA	Bagian MSDM	V	
13	JDIH (update dan perbaikan integrasi API dengan BPHN)	Website JDIH DPR merupakan platform daring yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyediakan akses elektronik kepada publik terkait dengan dokumen hukum dan informasi terkait legislasi.	Bagian Humas	V	
14	DUMAS (Penambahan fitur AI)	Website Pengaduan Masyarakat DPR adalah platform daring yang disediakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai saluran resmi bagi masyarakat untuk mengajukan pengaduan atau aspirasi.	Bagian Pengaduan Masyarakat	V	
15	Aplikasi Super API	<p><b>Aplikasi Super API</b> adalah platform integrasi data yang digunakan untuk mengelola akses layanan internal maupun eksternal melalui API.</p> <p>Pengembangan aplikasi Super API dilakukan dengan perubahan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan modul Single Sign-On (SSO) dan non-SSO.</li> <li>2. Pengelolaan database akun dan log aktivitas akun.</li> <li>3. Penyediaan Postman untuk pengujian Chatbot.</li> </ol> <p>Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan integrasi aplikasi.</p>	Pustekinfo	V	

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Unit Kerja Pengusul	Pengembangan	Pembangunan Baru
16	Aplikasi SIAP -> KP4	<p>Aplikasi SIAP -&gt; KP4 adalah aplikasi yang mendukung pengelolaan data kepegawaian untuk kebutuhan administrasi pegawai.</p> <p>Pengembangan aplikasi SIAP -&gt; KP4 dilakukan untuk menyelaraskan antarmuka pengguna dan memperbaiki bugs dengan perubahan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan minor bugs dari tahun 2023.</li> <li>• Penyelarasan UI pada halaman edit pegawai dengan KP4 Admin.</li> <li>• Pengembangan UI KP4 Admin untuk CPNS tahun 2023.</li> <li>• Perbaikan bugs data ganda.</li> <li>• Pemisahan fungsi verifikasi menjadi AdmKeu dan MKIASN.</li> </ul> <p>Penambahan fitur komentar untuk verifikasi AdmKeu dan MKIASN.</p> <p>Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi kepegawaian.</p>	Biro SDMA	V	
17	Aplikasi SIAP -> PKP/Tukin	<p>Aplikasi SIAP -&gt; PKP/Tukin adalah aplikasi untuk mengelola penilaian kinerja pegawai (PKP) dan tunjangan kinerja (Tukin).</p> <p>Pengembangan aplikasi SIAP -&gt; PKP/Tukin dilakukan untuk memperluas fungsionalitas dengan perubahan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan logo PKP.</li> <li>• Metadata bobot indikator.</li> <li>• Metadata bobot subindikator.</li> <li>• Fitur CRUD indikatorFitur CRUD subindikator.</li> <li>• Metadata variabel dan formula.</li> </ul>	Biro SDMA	V	

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Unit Kerja Pengusul	Pengembangan	Pembangunan Baru
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fungsi integrasi dan input variabel dari aplikasi lain.</li> <li>• Fungsi sinkronisasi dan pembaruan variabel.</li> <li>• Fungsi pembaruan variabel, formula, dan kalkulasi level 2, 3, 4, serta penerapan draf.</li> </ul>			
18	SIDIKLAT	<p><b>Aplikasi SIDIKLAT</b> adalah aplikasi untuk pengelolaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI.</p> <p>Pengembangan aplikasi SIDIKLAT dilakukan dengan perubahan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian minor untuk meningkatkan performa.</li> <li>• Integrasi data dengan BKN. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pelatihan.</li> <li>• Penambahan menu Open Data pada sidiklat Admin untuk memudahkan pegawai mengusulkan pelatihan yang telah diikuti secara mandiri</li> </ul>	PUSBANGKOM	V	
19	SIGOTA	<p>Aplikasi SIGOTA adalah aplikasi pengelolaan data keanggotaan DPR RI.</p> <p>Pengembangan aplikasi SIGOTA dilakukan untuk mendukung pengelolaan dokumen keanggotaan dengan perubahan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan fitur CRUD untuk pengelolaan dokumen anggota.</li> <li>• Penambahan metadata jenis dokumen anggota. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan pengelolaan dokumen anggota.</li> </ul>		V	

No	Nama Aplikasi	Deskripsi	Unit Kerja Pengusul	Pengembangan	Pembangunan Baru
20	Paripurna	Melakukan pengembangan pada aplikasi presensi sidang Anggota Dewan	PERSIPAR	V	

### 3.4. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Indeks Kepuasan Anggota DPR RI)

Berikut merupakan uraian capaian dan perbandingan pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja “**Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi**”.

#### 3.4.1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja

*Tabel 31 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024*

Indikator Kinerja : Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi				
Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori
3,32	3,32	3,76	113,25%	Sangat Tinggi

Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan yang telah disediakan oleh Pusat Teknologi Informasi diperoleh melalui survei kepuasan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2024 dengan kategori teknologi informasi.

Pelaksanaan survey terkait layanan Pusat Teknologi Informasi telah melengkapi responden yang dipersyaratkan dengan pengguna layanan meliputi Anggota DPR RI periode 2019–2024, yang pada saat survei dilakukan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya, Mitra Setjen DPR RI, merupakan seluruh unsur yang membutuhkan dan/atau menerima layanan Setjen DPR RI serta masyarakat umum. Jumlah keseluruhan responden adalah 50 dengan pelaksanaan metode manual, *link* dan *barcode*.

Adapun hasil dari nilai IKM Pusat Teknologi Informasi adalah 93,92 dengan kategori Sangat Baik dan jika dikonversi menjadi nilai indeks adalah 3,76 lebih

besar dari target yang ditetapkan yaitu 3,32. Sehingga indikator Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah terlaksana melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024 dengan pencapaian sebesar 113,25%.

### **3.4.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

**Tabel 32 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi dari Tahun ke Tahun**

Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3,10	3,31	106%	3,31	3,69	111%	3,32	3,76	113,5%

Perbandingan capaian dari indikator “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi” selama tiga tahun terakhir menunjukkan selalu tercapai target yang ditetapkan dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2024 dengan capaian yang diperoleh sebesar 113,5%.

Adapun faktor yang menjadi pendorong tercapainya target indikator Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi ini adalah peningkatan pada ketersediaan produk spesifikasi layanan teknologi informasi, sarana prasarana yang disediakan, persyaratan dan waktu kecepatan pelayanan yang diberikan oleh Pusat Teknologi Informasi.

### **3.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Pada Renstra**

**Tabel 33 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,76	3,32	113,5%

Dari tabel di atas realisasi indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi” pada tahun 2024 sebesar 3,76. Capaian akhir Renstra Realisasi indikator kinerja ini jika dibandingkan antara realisasi tahun 2024 dengan target periode akhir Renstra tahun 2020-2024 adalah sebesar 113,5%.

#### **3.4.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat perbandingan antara indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi Informasi” pada Pusat Teknologi Informasi dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

#### **3.4.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

***Tabel 34 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis***

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi Informasi	3,32	3,76	113,5%	Faktor pendukung keberhasilan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. adanya peningkatan kapasitas internet terutama untuk area publik dengan potensi jumlah pengguna yang banyak;</li> <li>b. menyediakan platform layanan berbasis aplikasi dan website yang terintegrasi dan penyampaian informasi pada laman DPR RI yang <i>realtime</i> dan <i>up to date</i>;</li> <li>c. kecepatan dan ketepatan dalam</li> </ul>	<b>1. Jaringan Internet</b> Pusat Teknologi Informasi menambahkan satu ISP baru di Wisma Griya Sabha Kopo sebagai backup jaringan, mengganti kabel UTP berusia lebih dari 7 tahun, dan meng-upgrade perangkat jaringan (switch access) dengan kecepatan uplink 10Gbps.  <b>2. Website DPR RI</b> Dilakukan redesign UI/UX website DPR RI untuk meningkatkan kenyamanan dan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
						<p>penanganan gangguan layanan teknologi informasi.</p> <p><b>3. Keamanan TI dan Insiden Siber</b> Pusat Teknologi Informasi mengimplementasikan Global Protect Zero Trust Network Access untuk memastikan akses jaringan hanya diberikan kepada pengguna dan perangkat yang terverifikasi.</p> <p><b>4. Penanganan Layanan TI</b> Aplikasi STELA ditingkatkan dengan fitur rating petugas untuk memantau dan meningkatkan kualitas layanan TI.</p> <p><b>5. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi</b> Pusat Teknologi Informasi mengintegrasikan fungsi Singarusa ke dalam STELA untuk menyederhanakan penanganan aduan dan permohonan pengembangan aplikasi, mempercepat proses layanan.</p>	kemudahan akses pengguna.

### **3.4.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya**

Terkait analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tidak ada penggunaan anggaran pada kegiatan pemenuhan indikator kinerja “Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi Informasi” di lingkup tugas Pusat Teknologi Informasi karena kegiatan ini dikoordinir oleh unit kerja yang mengelola pelaksanaan reformasi birokrasi.

### **3.4.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Layanan teknologi informasi yang disediakan oleh Pusat Teknologi Informasi bagi Anggota DPR RI diantaranya sebagai berikut:

- a) Jaringan internet DPR RI
- b) Website DPR RI ([dpr.go.id](http://dpr.go.id))
- c) Email dan Cloud DPR RI
- d) Penanganan gangguan layanan teknologi informasi (Helpdesk IT)
- e) Rapat Virtual DPR RI
- f) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi di DPR RI
- g) Keamanan teknologi informasi dan insiden siber DPR RI.
- h) Command Center dan Data Analitik
- i) Lainnya

Hasil survei kepuasan Anggota DPR RI atas layanan teknologi informasi melampaui target yang ditetapkan. Jumlah responden yang dilakukan survei sebanyak 50 responden pada periode pelaksanaan Maret s.d Mei 2024 dengan perolehan hasil unsur penilaian layanan Pusat Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 35 Hasil Survey IKM Layanan Pusat Teknologi Informasi Tahun 2024**

Unsur Penilaian	Hasil Survey
Layanan tidak dikenakan tarif/biaya	3,85
Perilaku SDM	3,78
Kenyamanan sarana prasarana pendukung	3,77
Kompetensi SDM	3,77
Kemudahan akses layanan konsultasi	3,75
Kesesuaian produk spesifikasi jenis layanan	3,75
Kemudahan system, mekanisme, dan prosedur	3,74
Persyaratan layanan	3,73
Ketersediaan informasi pelayanan	3,73
Jangka waktu penyelesaian layanan	3,70
<b>TOTAL IKM</b>	<b>3,76</b>
<b>Kategori</b>	<b>Sangat Baik</b>

### 3.5. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Nilai IKPA Pusat Teknologi Informasi)

Berikut merupakan uraian capaian dan perbandingan pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja “**Nilai IKPA Pusat Teknologi Informasi**”.

**Tabel 36 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Indikator Kinerja : Nilai IKPA Pusat Teknologi Informasi				
Target Renstra Tahun 2024	Target PK Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori
-	87,5	82,97	94,82%	Sangat Tinggi

Merujuk pada PMK Nomor 195/PMK.05/2018, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran diwujudkan melalui pengukuran kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator ini digunakan untuk menilai kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, efisiensi realisasi

anggaran, serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi. IKPA menjadi alat penting bagi Pusat Teknologi Informasi untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis DPR RI.

Indikator Nilai IKPA Pusat Teknologi Informasi baru ada di tahun 2024, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun lalu. Pada Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 (Revisi ke-2), tidak ada indikator Nilai IKPA Pusat Teknologi Informasi sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan. Indikator ini juga tidak ada standar nasionalnya sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

**Tabel 37 Rekap IKPA Pusat Teknologi Informasi Tahun 2024**

Rekap IKPA Pusat Teknologi dan Informasi									
Satker	Unit Kerja	Bulan	Penyerapan Anggaran	Deviasi Halaman III DIPA	Penyelesaian Tagihan	Belanja Kontraktual	Revisi DIPA	Capaian Output	Nilai IKPA
001012	Pusat Teknologi dan Informasi	1	6,84	15,00	10,00	10,00	10,00	25,00	85,37
001012	Pusat Teknologi dan Informasi	2	15,83	12,57	10,00	10,00	10,00	25,00	92,66
001012	Pusat Teknologi dan Informasi	3	16,08	9,45	10,00	10,00	7,00	25,00	86,15
001012	Pusat Teknologi dan Informasi	4	14,28	8,07	10,00	10,00	7,00	25,00	82,61
001012	Pusat Teknologi dan Informasi	5	16,01	6,80	10,00	10,00	7,00	25,00	83,12
001012	Pusat Teknologi dan Informasi	6	16,01	6,04	10,00	10,00	7,00	25,00	82,27
001012	Pusat Teknologi dan Informasi	7	15,16	5,56	10,00	10,00	8,80	25,00	82,81
001012	Pusat Teknologi dan Informasi	8	15,88	5,23	10,00	10,00	8,80	25,00	83,24
001012	Pusat Teknologi dan Informasi	9	16,39	6,15	10,00	10,00	7,00	25,00	82,82
001012	Pusat Teknologi dan Informasi	10	16,04	6,93	10,00	10,00	7,00	25,00	83,30
001012	Pusat Teknologi dan Informasi	11	16,45	6,67	10,00	10,00	7,00	25,00	83,47
001012	Pusat Teknologi dan Informasi	12	17,12	7,08	10,00	9,99	7,00	23,49	82,97

Dalam Semester I Tahun Anggaran 2024, Pusat Teknologi Informasi berhasil mencapai capaian terbaik pada bulan Februari, dengan nilai IKPA tertinggi yaitu 92,66. Pencapaian ini merupakan hasil dari penyerapan anggaran sebesar 15,83%, nilai deviasi Halaman III DIPA sebesar 12,57, serta penyelesaian tagihan, belanja kontraktual, dan revisi DIPA yang masing-masing mencapai nilai 10,00, yang menunjukkan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran. Keberhasilan ini memberikan bukti konkret atas upaya

optimalisasi proses pengelolaan anggaran, yang juga didukung oleh kerja sama lintas unit di lingkungan Pusat Teknologi Informasi.

Namun demikian, perolehan nilai IKPA hingga akhir tahun 2024 belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Salah satu kendala utama adalah adanya beberapa anggaran yang masih diblokir dan memerlukan tahapan clearance serta revisi buka blokir yang cukup memakan waktu. Proses ini berdampak pada berbagai aspek, termasuk penyerapan anggaran yang telah ditetapkan per triwulan, deviasi penyerapan anggaran per akun setiap bulan, jumlah revisi anggaran yang harus dilakukan, serta capaian output yang tidak tepat waktu.

Sebagai contoh, nilai deviasi Halaman III DIPA yang rendah pada bulan Desember, yaitu 7,02, menunjukkan dampak langsung dari keterlambatan revisi dan buka blokir anggaran terhadap pelaksanaan program. Hal ini turut memengaruhi nilai akhir IKPA Pusat Teknologi Informasi pada akhir tahun, yang berada di angka 82,97, lebih rendah dibandingkan capaian terbaik pada bulan sebelumnya.

Terkait analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tidak ada penggunaan anggaran pada kegiatan pemenuhan indikator kinerja “Nilai IKPA Pusat Teknologi Informasi” di lingkup tugas Pusat Teknologi Informasi karena kegiatan ini dikoordinir oleh unit kerja yang mengelola pelaksanaan reformasi birokrasi

Usaha yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan melakukan rapat koordinasi terkait clearance anggaran kegiatan Pusat Teknologi Informasi dengan mengundang narasumber dari Menpan, Kominfo, dan Bappenas. Telah dilakukan juga rapat koordinasi pembahasan clearance anggaran dengan unit kerja yang melaksanakan kegiatan terkait Teknologi Informasi. Perwakilan dari Pusat Teknologi Informasi juga menghadiri FGD Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi Belanja SPBE Instansi Pusat yang diselenggarakan oleh Menpan.

### **3.6. Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi (Percentase Realisasi Anggaran)**

Berikut merupakan uraian capaian dan perbandingan pada sasaran program meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi pada indikator kinerja “Percentase Realisasi Anggaran”.

#### **3.6.1. Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja**

**Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Indikator Kinerja : Percentase Realisasi Anggaran			
Target PK Tahun 2024	Realisasi	Capaian	Kategori
98%	99,69%	101,72%	Sangat Tinggi

Pada Tahun Anggaran 2024, Pusat Teknologi Informasi merealisasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebesar Rp. 80.123.334.646,-. Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 245.998.354,- sehingga apabila dihubungkan dengan target yang ingin dicapai pada indikator “Percentase realisasi anggaran” pada Tahun 2024, diperoleh nilai capaian realisasi anggaran sebesar 101,72%.

**Tabel 39 Perbandingan Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi Tahun 2022, 2023 dan 2024**

2022			2023			2024		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
72.748.422.000	72.317.351.744	99,41	57.672.789.000	57.434.426.470	99,59	80.369.333.000	80.123.334.646	99,69

(Sumber: Pusat Teknologi Informasi, 2024)

Pagu anggaran Pusat Teknologi Informasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 80.369.333.000,-. Realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 80.123.334.646,- atau 99,69%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun 2024, maka terjadi peningkatan sebesar 0,1%.

### **3.6.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

**Tabel 40 Perbandingan Capaian Indikator Persentase realisasi anggaran dari Tahun ke Tahun**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian	Target
2024	80.369.333.000	80.123.334.646	99,69%	98%
2023	57.672.789.000	57.434.426.470	99,59%	95%
2022	72.748.422.000	72.317.351.744	99,41%	93%
2021	152.111.153.000	150.918.053.567	99,22%	92,5%

Perbandingan capaian dari indikator “Persentase realisasi anggaran” selama tiga tahun terakhir menunjukkan selalu mencapai target dan terdapat peningkatan realisasi capaian dari target tahun sebelumnya. Capaian realisasi anggaran pada tahun 2024 diperoleh sebesar 99,69%.

### **3.6.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Akhir Pada Renstra**

Terkait dengan indikator Persentase realisasi anggaran, tidak terdapat perbandingan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra, karena indikator Persentase realisasi anggaran tidak tercantum pada Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 Revisi Ke-2.

Namun jika disandingkan dengan target yang terdapat pada Renja K/L Tahun Anggaran 2024 unit organisasi Pusat Teknologi Informasi yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 80.369.333.000,- dengan realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 80.123.334.646,- maka mendapat capaian akhir Renstra sebesar 104,94%.

**Tabel 41 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Akhir pada Renstra**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Capaian Akhir Renstra
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase realisasi anggaran	99,69%	98%	101,72%

### **3.6.4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

Terkait perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak bisa dilakukan karena tidak terdapat standar nasional perbandingan anggaran layanan teknologi informasi untuk indikator kinerja “Persentase realisasi anggaran” dengan indikator kinerja Kementerian/Lembaga lain.

### **3.6.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

**Tabel 42 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase realisasi anggaran	98%	99,69%	101,72%	Faktor keberhasilan antara lain: a. Evaluasi atas setiap capaian kinerja dan anggaran setiap triwulan; b. Perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan atas mekanisme dan prosedur kerja; c. Perbaikan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta evaluasi dan koordinasi.	Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja perencanaan dan anggaran serta K/L terkait clearance anggaran (KemenPAN-RB, Kemkominfo, dan Kementerian PPN/Bappenas)

### 3.6.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 43 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Capaian (CI)	Pagu Anggaran (PA)	Realisasi Anggaran (RA)	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Persentase realisasi anggaran	98%	99,69%	101,72%	80.369.333.000	80.123.334.646	99,69%

$$\text{Efisiensi Anggaran} = \frac{((\text{PA} \times \text{CI}) - \text{RA})}{(\text{PA} \times \text{CI})} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi Anggaran} = \frac{((80.369.333.000 \times 101,72\%) - 80.123.334.646)}{(80.369.333.000 \times 101,72\%)} \times 100\% = 2\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi di atas, indikator kinerja Persentase realisasi anggaran memiliki tingkat efisiensi sebesar 2% masih di dalam range batas maksimal sebesar 20% dan batas minimal sebesar -20%. Tingkat efisiensi tersebut menandakan penggunaan sumber daya yang digunakan telah efisien.

Namun demikian, PMK No. 22/PMK/02/2021 dicabut melalui PMK No. 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, di mana efisiensi penggunaan anggaran dihitung sesuai pada Lampiran II halaman 264 PMK No. 62/2023, yaitu sebagai berikut:

$$E = (\text{Cost per Unit Realisasi} / \text{Cost per Unit Target}) \times 100\%$$

$$= ((\text{realisasi anggaran}/\text{realisasi output}) / (\text{pagu anggaran}/\text{target output})) \times 100\%$$

$$= ((80.123.334.646/99,69) / (80.369.333.000/98)) \times 100\%$$

$$= (803.724.894 / 820.095.235) \times 100\%$$

$$= 98\%$$

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan/sasaran program “Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi” dengan indikator kinerja “Percentase realisasi anggaran” telah diselenggarakan dengan efisien dan efektif. Indikator kinerja, sudah mencapai target dengan realisasi sebesar 99,69% dengan persentase capaian anggaran yakni 101,72%. Nilai efisiensi anggaran untuk indikator kinerja “ Percentase Realisasi Anggaran” dengan penghitungan berdasarkan PMK No. 62/2023 adalah 98% yang membuktikan bahwa penggunaan sumber daya sudah efisien.

### **3.6.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Pencapaian persentase realisasi anggaran pada Pusat Teknologi Informasi yang berhasil melebihi target yang telah ditetapkan didukung oleh penggunaan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan jasa konsultan untuk Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi DPR RI, Audit Surveillance ISO 27001, Perancangan Business Continuity Plan Layanan Teknologi Informasi Parlemen, Perencanaan Manajemen Risiko dan Aset Teknologi Informasi, Perencanaan Manajemen Layanan Teknologi Informasi, Pelaksanaan Audit ISO 20000 Layanan TI, Penyusunan SOP Keamanan Informasi, Penyusunan Arsitektur SPBE As-Is dan To-Be, Perancangan Sistem IoT, dan Evaluasi RITIK 2025-2027;
- Kegiatan Sosialisasi Forum Satu Data DPR RI, Sosialisasi Keamanan Informasi;
- Rapat-rapat koordinasi antar bidang di Pusat Teknologi Informasi, antar unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maupun dengan K/L/I lainnya dalam rangka pendampingan pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi informasi seperti penyusunan kebijakan teknologi informasi, pengisian indeks keamanan informasi, indeks kematangan insiden siber, penilaian mandiri SPBE, dan audit teknologi informasi;
- Rapat-rapat koordinasi antar bidang di Pusat Teknologi Informasi, antar unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maupun dengan K/L/I lainnya seperti

KemenPAN-RB, Kominfo, Bappenas dalam rangka pengarahan terkait clearance anggaran dan pengisian SIEGA;

- Pelaksanaan studi implementasi dalam rangka Pengelolaan Layanan SPBE, Portal Satu Data, dan Data Analitik ke beberapa pemerintah daerah, diantaranya Medan, Bandung, Penajam Paser Utara, Sumedang, dan Purwakarta;
- Perjalanan dinas dalam rangka *monitoring data center* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan observasi kebutuhan kapasitas layanan Teknologi Informasi di Telkom Sigma dan Colocation di Taman Tekno Lintasarta, Serpong;
- Pembiayaan honor Tim Pengelola Satu Data DPR RI;
- Langganan Jasa Internet Dewan, Langganan Jasa Internet Setjen, Langganan Jasa Internet Colocation Data Center Telkomsigma, Langganan Jasa Internet Colocation Data Center Taman Tekno, Langganan Jasa Internet E-KTP, Langganan Jasa Internet Metro Pusat Data Nasional, Langganan Jasa Internet Dukcapil;
- Pemeliharaan Switch Access Gedung Dewan, Pemeliharaan Switch Access Gedung Setjen, Pemeliharaan Wireless Access Point Gedung Dewan, Pemeliharaan Wireless Access Point Gedung Setjen, Pemeliharaan AC Ruang Server, Pemeliharaan UPS Ruang Server, Pemeliharaan Fire Suppression System Ruang Server, Pemeliharaan Server Gedung DPR RI, Pemeliharaan Server Colocation Telkomsigma, Pemeliharaan Server Colocation Taman Tekno, Pemeliharaan Peralatan Command Center;
- Pengadaan beberapa perangkat jaringan seperti Pengadaan Power System Ruang Panel Wisma Griya Sabha Kopo, Pengadaan Fire Supression System Ruang Network Wisma Griya Sabha Kopo, Pengadaan Distribution Switch, Pengadaan Switch Access, Pengadaan Wireless Access Point, Pengadaan Peralatan Presensi Persidangan, Pengadaan Peralatan Pendukung Wireless Access Point Outdoor, Pengadaan Kabel UTP, Pengadaan Peralatan Komputer Jaringan, Pengadaan Peralatan Kabel Jaringan, Pengadaan Peralatan Pendukung Jaringan, Pengadaan Fire Suppression System Ruang Server, Pengadaan Power System Ruang Network Wisma Griya Sabha Kopo,

Pengadaan Rak Panel Wisma Griya Sabha Kopo, Pengadaan Baterai UPS Ruang Server, Pengadaan Konektor Fiber Optic Jaringan, Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi, Pengadaan Peralatan Keamanan Ruang Network dan Ruang Kerja, Pengadaan Peralatan Persidangan Rapat Online dan Peralatan Monitoring, Pengadaan Peralatan Machine Learning, Pengadaan Access Control Ruang Command Center, Pengadaan Sistem Proteksi Secure Service Edge, Pengadaan Kabel Konektor Fiber Optik, Pengadaan Peralatan Penunjang Kabel LAN, dll;

- Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Gedung Nusantara I, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Gedung Nusantara IV, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel KORPRI, PAM OBVIT, Jantung Sehat, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Gedung Nusantara, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Pengelola Rumah Jabatan, Rumah Dinas dan Unit Kerja, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Wisma Griya Sabha Kopo, Penarikan dan Perapihan Jaringan Kabel Fasilitas Umum;
- Langganan Licence dan Software, Langganan Lisensi Zoom, Webinar dan Paripurna, Langganan License Analis Kebijakan Parlemen, Langganan License Pengolahan Media Sosial, Langganan License Pengolahan Data Legislasi, Langganan License Kearsipan, Langganan License Pengolahan Data TV Parlemen, Langganan License dan Support Ruckus Smartcell Insight, Langganan License Collaboration Office 365, Langganan License Hybrid Collaboration Single Sign On System, Langganan License DNS Guardian, Langganan Liscence Pusbangkom, Langganan Liscence Adobe Pro, Langganan License Nessus, Langganan License ECLIS, Pengadaan License Server Productivity, Pengadaan Lisensi Visualisasi Data Analitik;
- Langganan Renewal Support Link Controller, Langganan Renewal Support Core Switch dan Smartzone, Langganan Renewal Support dan Subscription Firewall di Gedung DPR RI, Langganan Renewal Support dan Subscription Web Application Firewall, Langganan Renewal Support Wireless Access Point, Langganan Renewal Support Perangkat DNS, DHCP, dan IP Address Management (DDI), Pengadaan Renewal Software Backup;

- Sewa Collocation Data Center Telkomsigma Januari-Maret 2024, Sewa Collocation Data Center Telkomsigma April - September 2024, Sewa Collocation Data Center TamanTekno, Penambahan Sewa Collocation Data Center Taman Tekno;
- *Managed Operation Service Big Data*;
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honorarium dalam rangka Seminar/Workshop/Lokakarya/FGD, dan Honor dalam rangka Seminar/Workshop/Lokakarya/FGD/Studi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Perjalanan Dinas Dalam Kota (Rumah pimpinan, RJA Kalibata, dan RJA Ulujami), Perjalanan dinas dalam Rangka Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan IT (Wisma Griya Sabha Kopo, Data Center Telkom Sigma, dan Data Center Taman Tekno), dan perjalanan dinas untuk *workshop*;
- Pembangunan Aplikasi Satu Data DPR RI, Pembangunan Aplikasi Sistem Manajemen Tenaga Pendukung, Pembangunan Sistem Repositori Aset Aplikasi Terintegrasi;
- Pengembangan Peralatan Command Center, Pengadaan Peralatan Virtual Meeting Command Center, Pengadaan Media Collaborator Command Center;
- Perbaikan Instalasi Alat Pemadam Kebakaran;
- Pengadaan Pengukuran Tingkat Kematangan Teknologi Informasi Setjen DPR RI;
- Pengembangan Aplikasi meliputi pembangunan aplikasi mobile "Open Parliament", pengembangan sistem informasi permintaan terbitan, pengembangan aplikasi dan website E-Media, serta pengembangan Super Apps Anggota DPR RI;
- Pengembangan dan Integrasi Sistem meliputi integrasi basis data JDIHN berbasis AI, integrasi pengaduan masyarakat berbasis AI, integrasi website Badan Keahlian Dewan, integrasi sistem Single Sign-On portal pegawai Setjen DPR RI, dan pembangunan framework berbasis AI;
- Langganan dan Layanan Teknologi meliputi langganan WA Gateway, langganan SMS Gateway, langganan WA Gateway Setjen DPR RI, dan pengadaan layanan Conversational Artificial Intelligence Service; dan

- Pengembangan dan Dukungan Event meliputi pengembangan website Conference IPPP 2024.

### 3.7. Realisasi Anggaran Pusat Teknologi Informasi

Pada tahun anggaran 2024, Pustekinfo melaksanakan beberapa program dukungan manajemen dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp80.369.333.000,- dan realisasi anggaran mencapai Rp80.123.344.646,- atau 99,69%. Adapun rincian realisasi program/output/kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 44 Realisasi Anggaran Pustekinfo**

Program/Output/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
<b>WA. Program Dukungan Manajemen</b>			
WA.5795. Pengelolaan Teknologi Informasi	80.369.333.000	80.123.344.646	99,69%
CAN. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			
CAN. 001. Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.000.000.000	1.996.526.232	99,83%
051. Pengadaan Infrastruktur Penunjang Teknologi Informasi	2.000.000.000	1.996.526.232	99,83%
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal			
EBA. 962. Layanan Umum	20.668.796.000	20.613.101.663	99,73%
051. Layanan Koordinasi Pusat Teknologi Informasi	1.716.988.000	1.704.227.929	99,26%
052. Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi	17.418.908.000	17.404.026.910	99,91%
053. Tata Kelola Teknologi Informasi	1.532.900.000	1.504.846.824	98,17%
EBA. 994. Layanan Perkantoran	11.809.735.000	11.783.925.240	99,78%
002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	11.809.735.000	11.783.925.240	99,78%
FAB. Sistem Informasi Pemerintahan			
FAB. 963. Layanan Data dan Informasi	45.890.802.000	45.729.781.511	99,65%
051. Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi	16.348.250.000	16.307.252.931	99,75%
052. Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi	23.250.018.000	23.219.578.960	99,87%
053. Tata Kelola TI	6.292.534.000	6.202.949.620	98,58%

## **1. Pengelolaan Teknologi Informasi (WA.5795):**

- Pagu anggaran sebesar Rp80.369.333.000,- dengan realisasi Rp80.123.344.646,- mencapai tingkat capaian 99,69%.

## **2. Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (CAN):**

- Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki pagu sebesar Rp2.000.000.000,- dengan realisasi Rp1.996.526.232,- (99,83%).
- Pengadaan Infrastruktur Penunjang Teknologi Informasi memiliki pagu dan realisasi yang sama, yaitu Rp2.000.000.000,- dengan tingkat capaian sebesar 99,83%.

## **3. Layanan Dukungan Manajemen Internal (EBA):**

- Layanan Umum dengan pagu Rp20.668.796.000,- dan realisasi Rp20.613.101.663,- mencapai capaian 99,73%.
- Layanan Koordinasi Pusat Teknologi Informasi memiliki pagu Rp1.716.988.000,- dengan realisasi Rp1.704.227.929,- (99,26%).
- Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi (Rp17.418.908.000,-) memiliki realisasi Rp17.404.026.919,- dengan capaian 99,91%.
- Tata Kelola Teknologi Informasi memiliki pagu Rp1.532.900.000,- dengan realisasi Rp1.504.846.824,- mencapai capaian 98,17%.
- Layanan Perkantoran memiliki pagu Rp11.809.735.000,- dengan realisasi Rp11.783.925.240,- mencapai capaian 99,78%.

## **4. Sistem Informasi Pemerintahan (FAB):**

- Layanan Data dan Informasi dengan pagu Rp45.890.802.000,- dan realisasi Rp45.729.781.591,- mencapai capaian 99,65%.
- Pengadaan Infrastruktur Teknologi Informasi memiliki pagu Rp16.348.250.000,- dengan realisasi Rp16.343.250.000,- mencapai capaian 99,97%.

- Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dengan pagu Rp23.250.018.000,- dan realisasi Rp23.219.578.000,- mencapai capaian 99,87%.
- Tata Kelola Teknologi Informasi dengan pagu Rp6.292.534.000,- dan realisasi Rp6.202.949.600,- mencapai capaian 98,58%.

Secara keseluruhan, program-program yang dilaksanakan oleh Pustekinfo menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dengan sebagian besar capaian realisasi anggaran mendekati atau melebihi 99%. Hal ini mencerminkan optimalisasi pengelolaan anggaran untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Pusat Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan tata kelola teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi yang membawahi 2 (dua) bidang yaitu Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi, dengan masing-masing bidang memiliki kelompok jabatan fungsional Pranata Komputer.

Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan kinerja kegiatan dan kinerja anggaran yang dilakukan oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan Pusat Teknologi Informasi. Laporan ini menyajikan keberhasilan, capaian maupun kendala yang dihadapi oleh segenap jajaran yang berada dalam unit kerja ini selama tahun anggaran 2024. Berbagai capaian kinerja tersebut tercermin baik dalam capaian Indikator Kinerja maupun analisis kinerja yang diturunkan dari sasaran program dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Teknologi Informasi.

Pada 2024, Kepala Pusat Teknologi Informasi memiliki 6 (enam) indikator kinerja yang diturunkan ke dalam sasaran program Kepala Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi. Indikator kinerja ini direpresentasikan dalam bentuk capaian *outcome*. Secara umum, tingkat keberhasilan kinerja kegiatan Pusat Teknologi Informasi tampak pada pencapaian realisasi yang sesuai dengan target. Dengan kata lain, kegiatan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh Pusat Teknologi Informasi selama tahun 2024 dapat dilakukan sesuai target.

Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat Teknologi Informasi yang telah dilakukan oleh dua Bidang unit kerja yakni Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi memberikan kenaikan capaian realisasi penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2024 dengan capaian sebesar 99,69% dan realisasi anggaran keseluruhan Rp 80.123.334.646,-.

Bertujuan dalam mengantisipasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang terjadi agar tercapai kinerja yang ditargetkan, maka Kepala Pusat Teknologi Informasi menetapkan kebijakan antara lain:

- a. Melakukan identifikasi secara menyeluruh terhadap rencana kegiatan dan anggaran, baik untuk tahun mendatang maupun revisi anggaran pada tahun berjalan, dengan fokus pada optimalisasi sumber daya dan peningkatan efisiensi anggaran;
- b. Menyusun dan melengkapi dokumen kerangka acuan serta dokumen pendukung kegiatan lainnya secara sistematis dalam proses penyusunan rencana kerja unit untuk memastikan keselarasan dengan tujuan organisasi;
- c. Mengintensifkan koordinasi dengan unit kerja terkait perencanaan, penganggaran, serta kementerian/lembaga (KemenPAN-RB, Kemkominfo, Kementerian PPN/Bappenas) untuk mendukung penyusunan rencana kerja yang terintegrasi dan proses clearance anggaran yang lebih cepat dan efektif;
- d. Menjalin kemitraan serta berkonsultasi secara proaktif dengan unit kerja yang bertanggung jawab atas pengawasan internal guna mengatasi permasalahan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, termasuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku;
- e. Memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan siklus manajemen Plan-Do-Check-Act (PDCA) yang terstruktur dan menghasilkan outcome serta output yang jelas dan terukur;
- f. Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- g. Memastikan dokumentasi seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis, teratur, dan baik, serta proses pertanggungjawaban dilakukan tepat waktu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
- h. Mengembangkan sistem informasi berbasis digital untuk mendukung pengelolaan data kegiatan, sehingga mempermudah monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara real-time;

- i. Mendorong penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan organisasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan.

#### 4.2. Rekomendasi

Hasil capaian dari indikator kinerja Pusat Teknologi Informasi sudah melampaui target dengan kategori capaian “sangat tinggi”. Namun perlu ada perbaikan yang berkelanjutan untuk keberhasilan kinerja di tahun depan. Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan diantaranya:

- a. Berkoordinasi secara intensif dengan unit kerja yang mengelola kinerja organisasi, reformasi birokrasi, serta unit kerja yang mengelola perencanaan dan anggaran, guna menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Teknologi Informasi beserta definisi indikator yang berbasis prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Langkah ini bertujuan menciptakan ukuran target dan capaian yang realistik, efektif, efisien, dan optimal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi;
- b. Melakukan koordinasi berkelanjutan dengan unit kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan kepegawaian, pengelolaan jabatan fungsional Pranata Komputer, serta pemetaan beban kerja. Upaya ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pusat Teknologi Informasi secara terstruktur dan berkesinambungan;
- c. Menyelenggarakan Forum Satu Data DPR RI secara rutin serta memberikan bimbingan teknis secara berkesinambungan kepada para produsen data dalam rangka penerapan tata kelola data yang baik melalui optimalisasi penggunaan Portal Satu Data DPR RI sebagai instrumen utama pengelolaan data yang terintegrasi;
- d. Melaksanakan sosialisasi terkait keamanan informasi secara berkala dan konsisten, dengan cakupan yang tidak hanya terbatas pada ASN dan TA/SAA pendukung Anggota Dewan, tetapi juga mencakup Tenaga Sistem Pendukung (TSP) di lingkungan DPR RI untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan informasi di seluruh lingkungan kerja;

- e. Sebagai unit yang memegang peranan kunci dalam penyediaan akses internet di seluruh kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pusat Teknologi Informasi perlu memprioritaskan peningkatan kecepatan akses internet, khususnya pada area-area publik tertentu yang menjadi fokus produktivitas kerja;
- f. Melakukan koordinasi strategis dengan unit kerja terkait perencanaan dan penganggaran guna mengantisipasi permasalahan terkait blokir atau pemberian bantuan pada anggaran kegiatan teknologi informasi. Upaya ini sangat penting, terutama untuk memastikan kelangsungan layanan strategis yang harus tetap berjalan selama masa transisi pergantian tahun anggaran, guna memitigasi risiko terhentinya layanan yang berpotensi mengganggu operasional organisasi.

## LAMPIRAN 1

### PERJANJIAN KINERJA KEPALA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SATKER SETJEN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.  
Jabatan : Kepala Pusat Teknologi Informasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si  
NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 6 Desember 2023  
Pihak Pertama,

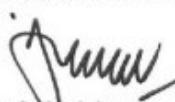
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si  
NIP. 19650705 199103 1 003

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sangat Baik (3,6)
2.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Data dan Informasi	1. Persentase Dukungan Teknologi Informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2. Persentase Aplikasi yang Terintegrasi 3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Teknologi dan Informasi 4. Nilai IKPA Pusat Teknologi Informasi - Revisi DIPA - Deviasi Halaman III DIPA - Penyerapan Anggaran - Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Capaian Output	91% 96% 3,32 96 9,60 9,60 24,00 9,60 14,40 28,80
		5. Persentase Realisasi Anggaran	98%

Program	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp80.426.754.000,00

Sekretaris Jenderal,

  
Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si  
 NIP. 19661114 199703 1 001

Jakarta, 6 Desember 2023  
 Kepala Pusat Teknologi Informasi,

  
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si  
 NIP. 19650705 199103 1 003

## LAMPIRAN 2

### SURAT TUGAS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

#### SURAT TUGAS

Nomor : B/226/PR.05.04/12/2024

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menugaskan Pegawai di lingkungan Pusat Teknologi Informasi.  
b. bahwa untuk penugasan Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Surat Tugas dari pejabat yang berwenang.
- Menimbang : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);  
3. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;  
4. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023;

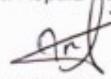
#### Memberi Tugas

Kepada :	No	Nama	NIP	JABATAN
	1.	Rahayu Yuni Susanti, S.T., M.T.I.	198506102009122003	Pranata Komputer Ahli Madya
	2.	Awang Eko Feryanto, S.Kom.	198211052003121004	Pranata Komputer Ahli Muda
	3.	Astari Khaniasty, S.Kom	199010152022032001	Pranata Komputer Ahli Pertama
	4.	Bagus Tri Astadi, S.T.	199505312022021001	Pranata Komputer Ahli Pertama
	5.	Ahmad Riyadi, S.T.	199602212022021001	Pranata Komputer Ahli Pertama

2024

Untuk : melakukan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi Tahun 2024.

Jakarta, 16 Desember 2024  
Plh. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi,

  
Fariza Emra, S.T., M.Sc.  
NIP. 198001082009121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
3. Kepala Bidang Sistem Informasi & Infrastruktur TI
4. Kepala Bidang Tata Kelola TI
5. Yang bersangkutan.



**Pusat Teknologi Informasi  
Sekretariat Jenderal**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

